



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKIP)

**TAHUN  
2022**

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS  
DINAS PERHUBUNGAN

JALAN OTTO ISKANDAR DINATA,  
LINGKAR SELATAN-BENTENG CIAMIS  
46217

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kekhadirat Allah Swt, karena hanya atas perkenan dan ridhoNya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Tahun 2022 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini diharapkan menjadi salah satu media untuk dapat mengukur dan mengevaluasi sampai sejauh mana program kerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sehingga menjadi bahan pertimbangan untuk peningkatan kinerja dan pencapaian sasaran ditahun yang akan datang.

Kami sadari bahwa laporan ini masih belum sempurna baik dari segi materi maupun cara penyusunannya, untuk itu saran dan masukan yang bersifat konstruktif akan sangat kami hargai.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Ciamis, 28 Februari 2023

PI. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN CIAMIS



**Drs. ACHMAD YANI, MM**  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19751118 199412 1 001

# EXECUTIVE SUMMARY

Dinas perhubungan dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis, Dinas Perhubungan adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan. Beberapa isu strategis yang berdampak terhadap tugas pokok dan fungsi dinas perhubungan yaitu :

1. Peningkatan upaya dalam menurunkan angka kecelakaan lalu lintas.
2. Pengembangan Bandara Kertajati di Majalengka yang menuntut kemudahan aksesibilitas pergerakan orang dan barang.
3. Peningkatan status sebagai jalan provinsi untuk ruas jalan lingkaran selatan (Imbanagara – Panyingkiran – Benteng).
4. Peningkatan pelayanan terhadap unit pengujian kendaraan bermotor.
5. Peningkatan pelayanan angkutan untuk mengimbangi kemajuan perkembangan teknologi.

Dari uraian isu strategis tersebut maka ditetapkan sasaran strategis. Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perhubungan dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 adalah :

- a. Meningkatnya sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan angkutan darat yang berfungsi dengan baik
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah
- c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada Perangkat Daerah
- d. Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah
- e. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah

Dari 5 (lima) sasaran strategis yang telah ditetapkan baik yang dianalisis terhadap indikator kinerja utama maupun realisasi pengukuran perjanjian kinerja, capaiannya mencapai 96,46% untuk sasaran terhadap IKU dan terhadap perjanjian kinerja capaiannya 96,46% yang artinya capaian sasaran ada dalam kondisi baik.

Dalam mewujudkan sasaran strategis tersebut Dinas Perhubungan mengelola alokasi anggaran sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 58.307.301.416** dengan rincian untuk belanja operasi sebesar **Rp. 7.045.205.916** dan belanja barang dan jasa sebesar **Rp. 25.660.424.450** serta untuk belanja modal sebesar **Rp. 25.601.671.050** dengan capaian realisasi keuangan sebesar **56,69 %**.

# DAFTAR ISI

|                  |   |           |
|------------------|---|-----------|
| KATA PENGANTAR   | i   |           |
| EXECUTIF SUMMARY | ii  |           |
| DAFTAR ISI       | iii   |           |
| DAFTAR LAMPIRAN  | v   |           |
| <b>BAB I</b>     | <b>PENDAHULUAN</b>                                  | <b>1</b>  |
|                  | A. Dasar Pembentukan Organisasi.....                | 1         |
|                  | B. Aspek Strategis Organisasi .....                 | 4         |
|                  | C. Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi .....          | 7         |
|                  | D. Struktur Organisasi.....                         | 7         |
|                  | E. Sumber Daya Manusia.....                         | 8         |
|                  | F. Sarana Prasarana Kantor.....                     | 12        |
|                  | G. Anggaran .....                                   | 14        |
| <b>BAB II</b>    | <b>PERENCANAAN KINERJA</b>                          | <b>16</b> |
|                  | A. Rencana Strategis .....                          | 16        |
|                  | 1. Visi .....                                       | 16        |
|                  | 2. Misi .....                                       | 17        |
|                  | 3. Tujuan .....                                     | 17        |
|                  | 4. Sasaran .....                                    | 18        |
|                  | 5. Program Dan Kegiatan.....                        | 20        |
|                  | B. Perjanjian Kerja Tahun 2021.....                 | 24        |
|                  | 1. Perjanjian Kinerja Sesuai Sasaran Strategis..... | 24        |
|                  | 2. Sasaran Strategis Pada IKU.....                  | 26        |
| <b>BAB III</b>   | <b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>                        | <b>29</b> |
|                  | A. Capaian Kinerja .....                            | 29        |

|               |   |           |
|---------------|---|-----------|
| 1.            | Target Dan Realisasi Kinerja.....   | 29        |
| 2.            | Analisis Keberhasilan Capaian Kinerja Sasaran                                 | 47        |
| 3.            | Analisis Atas Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran (Akhir Periode Renstra)..... | 52        |
| B.            | Realisasi Anggaran .....  | 52        |
| 1.            | Realisasi Belanja Tahun 2021.....   | 52        |
| 2.            | Perkembangan Alokasi Anggaran Selama 5 Tahun                                  | 53        |
| 3.            | Realisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah                                  | 56        |
| 4.            | Perkembangan Capaian PAD Selama 5 Tahun                                       | 58        |
| C.            | Analisis Atas Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran                              | 59        |
| <b>BAB IV</b> | <b>PENUTUP</b>  | <b>62</b> |
| A.            | Kesimpulan .....  | 62        |
| B.            | Saran.....  | 62        |

**LAMPIRAN**

# DAFTAR LAMPIRAN

## LAMPIRAN I

Surat Keputusan Indikator Kinerja Utama  
Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis  
Tahun Anggaran 2019-2024

## LAMPIRAN II

Perjanjian Kinerja  
Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis  
Tahun Anggaran 2022

## LAMPIRAN III

Pengukuran Pencapaian Perjanjian Kinerja  
Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis  
Tahun Anggaran 2022

## LAMPIRAN IV

Pengukuran Kinerja Kegiatan  
Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis  
Tahun Anggaran 2022

## LAMPIRAN V

Data Alokasi Belanja Selama 5 Tahun  
Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

## LAMPIRAN VI

Data Penerimaan Pendapatan Asli Daerah  
Selama 5 Tahun  
Dinas Perhubungan Kabupaten

## LAMPIRAN VII

Data Survei Kepuasan Masyarakat  
Tahun 2022  
Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

## LAMPIRAN VIII

DATA KINERJA  
Tahun 2022  
Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis

# ***BAB I***

## ***PENDAHULUAN***

### **A. Dasar Pembentukan Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan ( LAKIP ) dalam hal ini Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2022 merupakan bentuk laporan realisasi pertanggungjawaban dari Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis kepada Bapak Bupati.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun untuk memberikan pertanggungjawaban secara transparan mengenai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam pendahuluan ini akan kami uraikan kedudukan dari Laporan Kinerja serta kedudukan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis, kemudian tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi serta lingkungan strategis yang berpengaruh.

Seperti telah diuraikan di atas kedudukan Laporan Kinerja adalah wajib dilaksanakan oleh setiap pejabat termasuk para pejabat eselon II yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis.

Sebagai landasan atau dasar hukum penyusunan laporan ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum;
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal;
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek;
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  25. Peraturan Bupati Kabupaten Ciamis Nomor 40 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Perhubungan;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2022;
27. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2020;
28. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
29. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Parkir Khusus;
30. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Penarikan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang terhutang;
31. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Ciamis.
32. Peraturan Bupati Ciamis No 55 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Parkir Berlangganan Di Tepi Jalan Umum.
33. Peraturan Bupati Ciamis No. 77 Tahun 2022 tentang Tarif Definitif Angkutan Penumpang Umum Lokal Di Kabupaten Ciamis
34. Keputusan Bupati No. 900/Kpts.70-Huk/2022 tentang Penetapan Penerima Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis.

## **B. Aspek Strategis Organisasi**

Analisa lingkungan organisasi baik yang bersifat internal maupun eksternal merupakan hal yang penting dalam menetapkan faktor-faktor penentu keberhasilan bagi suatu organisasi. Dengan mengetahui kondisi internal maupun eksternal dari organisasi akan dapat diketahui tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mempengaruhi organisasi.

Identifikasi lingkungan yang dirumuskan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis berdasarkan Rencana Strategis tahun 2018 – 2020 adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

a. Kekuatan

- Jumlah pegawai dinas cukup memadai.
- Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- Adanya program kerja yang jelas.
- Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah.

b. Kelemahan

- Kualitas SDM belum memadai sesuai tupoksi, belum sepenuhnya pegawai dinas memiliki kualifikasi dan kompetensi dibidang perhubungan.
- Terbatasnya tingkat pemahaman aparatur terhadap peraturan perundangan yang berlaku.
- Sarana dan prasarana perhubungan secara kualitas dan kuantitas belum memadai.
- Keterbatasan anggaran yang belum seimbang antara usulan pada perencanaan dengan kebijakan anggaran.

2. Lingkungan Eksternal

a. Peluang

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2014-2019.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Adanya bantuan teknis dari tingkat pusat maupun provinsi.
- Tumbuhnya sentra agrobisnis dan komoditi hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan serta pembukaan destinasi wisata sehingga diperlukan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung kegiatan dimaksud.

- Berkembangnya daerah bagian utara dan tengah kabupaten Ciamis sebagai daerah agropolitan dan daerah wisata.
- b. Tantangan / Ancaman
- Masih rendahnya tingkat kesadaran dan disiplin masyarakat pengguna jalan terhadap tertib lalu lintas.
  - Menurunnya minat masyarakat terhadap penggunaan angkutan penumpang umum.
  - Kecelakaan lalu lintas yang terjadi melibatkan usia produktif yang tentunya mengancam terhadap generasi penerus pelaku pembangunan.
  - Meningkatnya pelayanan angkutan orang dalam jaringan yang tentunya menjadi hambatan bagi usaha angkutan umum konvensional sehingga sebagai regulator perlu mengambil langkah strategis yang berimbang mengingat disisi lain angkutan dalam jaringan tersebut membantu masyarakat dalam melakukan kebutuhan akan transportasi.

Dari identifikasi permasalahan tersebut di atas beberapa isu strategis bagi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan upaya dalam menurunkan angka kecelakaan lalu lintas.
2. Pengembangan Bandara Kertajati di Majalengka yang menuntut kemudahan aksesibilitas pergerakan orang dan barang.
3. Peningkatan status sebagai jalan provinsi untuk ruas jalan lingkaran selatan (Imbanagara – Panyingkiran – Benteng).
4. Peningkatan pelayanan terhadap unit pengujian kendaraan bermotor.
5. Peningkatan pelayanan angkutan untuk mengimbangi kemajuan perkembangan teknologi.
6. Pengembangan Area Traffic Control System (ATCS) di Kabupaten Ciamis.

### **C. Tugas Pokok Dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijaksanaan penyelenggaraan urusan perhubungan yang meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan perhubungan yang meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **D. Struktur Organisasi**

Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis sesuai Peraturan Bupati Ciamis Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:

1. Pimpinan adalah Kepala Dinas
2. Sekretariat
  - a) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
  - b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Angkutan
  - a) Seksi Bina Usaha Angkutan
  - b) Seksi Jaringan Transportasi
4. Bidang Lalu Lintas
  - a) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

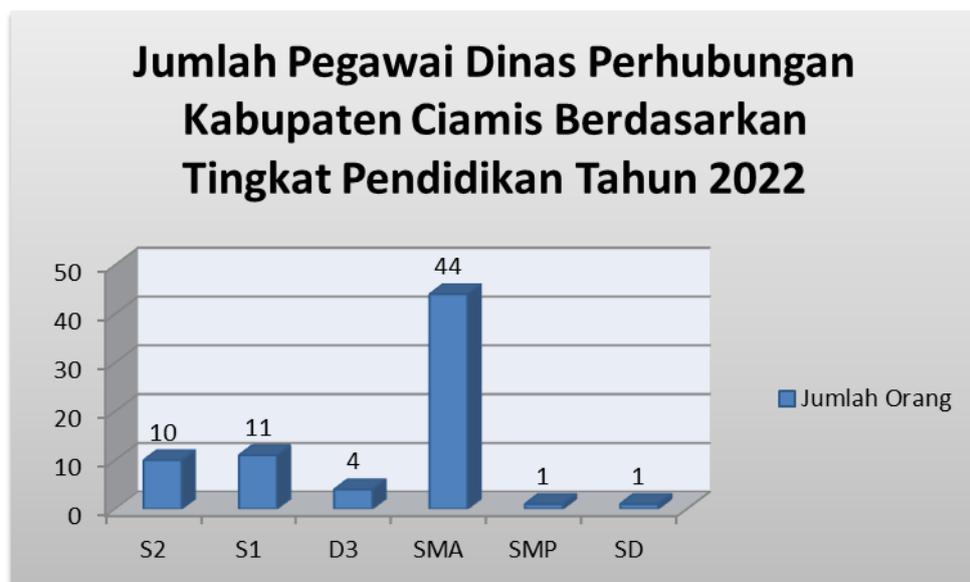
- b) Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas
- 5. Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan
  - a) Seksi Teknik Sarana
  - b) Seksi Teknis Keselamatan
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
  - a) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
  - b) UPTD Parkir
  - c) UPTD Terminal Ciamis
  - d) UPTD Terminal Kawali
  - e) UPTD Terminal Banjarsari
  - f) Subag Tata Usaha UPTD
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional

Dari uraian tersebut berikut susunan organisasi pada Dinas Perhubungan secara terstruktur pada lampiran.

#### E. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Dinas Perhubungan pada tahun 2021 yaitu sebanyak 71 orang, komposisi pegawai berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada gambar grafik sebagai berikut :

Gambar 1.1  
Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022



Dari grafik tersebut sebagian besar tingkat pendidikan pegawai Dinas Perhubungan didominasi oleh lulusan SLTA/SMA sederajat atau sekitar 61,97% dari total pegawai. Sedangkan jumlah pegawai Dinas Perhubungan berdasarkan pangkat/ golongan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut .

Tabel 1.1  
Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2022

| NO            | PANGKAT DAN GOLONGAN | JUMLAH (Orang) | PROSENTASI (%) |
|---------------|----------------------|----------------|----------------|
| 1             | Juru/ Gol. I         | 2              | 2,82           |
| 2             | Pengatur/ Gol. II    | 39             | 54,93          |
| 3             | Penata/ Gol. III     | 22             | 30,99          |
| 4             | Pembina/ Gol. IV     | 8              | 11,27          |
| <b>JUMLAH</b> |                      | <b>71</b>      | <b>100,00</b>  |

Dari tabel tersebut dapat diilustrasikan komposisi pegawai sebagai berikut :

Gambar 1.2  
Komposisi Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2022



Dari gambar tersebut jumlah komposisi dominan yaitu pada golongan II. Sedangkan untuk posisi akhir tahun 2022, jumlah jabatan struktural yang ada sebanyak 21 orang dan terisi 17 orang, yakni:

Tabel 1.2  
Jumlah Jabatan Struktural Tahun 2022

| NO            | JABATAN STRUKTURAL | ADA       | TERISI    | KETERANGAN           |
|---------------|--------------------|-----------|-----------|----------------------|
| 1             | ESELON II.B        | 1         | -         | Kepala Dinas         |
| 2             | ESELON III.A       | 1         | 1         | Sekretaris Dinas     |
| 3             | ESELON III.B       | 3         | 3         | Kepala Bidang        |
| 4             | ESELON IV.A        | 11        | 9         | Kasi/Kasubag/Ka.UPTD |
| 5             | ESELON IV.B        | 5         | 4         | Kasubag UPTD         |
| <b>JUMLAH</b> |                    | <b>21</b> | <b>17</b> |                      |

Di Dinas Perhubungan juga terdapat jabatan fungsional yaitu pengujian kendaraan bermotor dan ada 2 (dua) orang yang menjabat sebagai fungsional pengujian kendaraan bermotor, dengan rincian :

Tabel 1.3  
Jumlah Pengujian Kendaraan Bermotor  
pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Tahun 2022

| No            | Jabatan             | Jumlah (orang) |
|---------------|---------------------|----------------|
| 1.            | Pengujian Tingkat 4 | 3              |
| 2.            | Pengujian Tingkat 2 | 1              |
| 3.            | Pengujian Pemula    | 1              |
| <b>Jumlah</b> |                     | <b>5</b>       |

Selain fungsional pengujian kendaraan bermotor ada beberapa pegawai yang telah mengikuti diklat teknis di bidang perhubungan, diantaranya yaitu :

Tabel 1.4  
Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Perhubungan

| No | Diklat Teknis Perhubungan  | Jumlah (orang) |
|----|----------------------------|----------------|
| 1. | PPNS                       | 2              |
| 2. | Penguji Kendaraan Bermotor | 5              |
|    | <b>Jumlah</b>              | <b>7</b>       |

Diklat teknis perhubungan tersebut diatas penyelenggaranya sebagian besar dari Kementerian Perhubungan melalui Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Bekasi dan Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal.

Selain diklat teknis perhubungan juga ada beberapa pegawai yang telah mengikuti diklat, bimtek atau workshop yang diselenggarakan dari instansi lain maupun dari lembaga pendidikan lainnya.

Tabel 1.5  
Daftar Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat/Bimtek/Workshop

| No | Diklat/Bimtek/Workshop                                  | Jumlah (orang) | Penyelenggara            |
|----|---|----------------|--------------------------|
| 1. | Literasi Digital Sektor Pemerintah                      | 1              | BPSDM                    |
| 2. | Melokalan SDGs Kedalam Pembangunan Daerah               | 1              | B. Trust. Advisory Group |
| 3. | Indeks Kualitas Kebijakan                               | 1              | Setda                    |
| 4. | Proses Bisnis   | 1              | Setda                    |
| 5. | E-SAKIP   | 1              | Setda                    |
| 6. | Seminar Nasional SALUD                                  | 10             | PKTJ                     |
| 7. | Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi          | 1              | Diskominfo               |
| 8. | Peran Hukum Dalam Era Transformasi Digital Transportasi | 2              | Dishub Prov Jabar        |
|    | <b>Jumlah</b>   | <b>18</b>      |                          |

Dengan jumlah pegawai yang ada, banyak pegawai yang masih belum bisa mengikuti kesempatan untuk mengikuti baik diklat, bimtek maupun

karena keterbatasan kompetensi pendidikan minimal sebagai syarat untuk mengikuti diklat dimaksud.

## F. Sarana Dan Prasarana Kantor

### 1) Kendaraan Dinas Operasional

Kendaraan operasional tahun 2022 sebanyak 28 (dua puluh sembilan) unit yang terdiri dari 17 (tujuh belas) unit kendaraan roda 2, 9 (delapan) unit kendaraan roda 4, 2 (dua) unit kendaraan roda 6.

### 2) Gedung Kantor

Kantor Dinas Perhubungan saat ini menempati bangunan yang memang sudah disediakan untuk kantor Dinas Perhubungan dengan lokasi ideal berdekatan dengan unit pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

### 3) Perlengkapan Kantor

Perlengkapan kantor yang ada perlu diperbaharui, mengingat ada beberapa meja dan kursi yang rusak berat. Namun sebagian besar masih dalam kategori cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan kerja pegawai. Dibawah ini kami sajikan jenis perlengkapan kantor yang ada dengan kondisinya .

Tabel 1.6  
Jumlah Perlengkapan Kantor Pada Dinas Perhubungan  
Kabupaten Ciamis

| NO | NAMA BARANG         | JUMLAH | KONDISI |       |
|----|---------------------|--------|---------|-------|
|    |                     |        | BAIK    | RUSAK |
| 1  | Brankas             | 2      | 1       | 1     |
| 2  | Mesin Absensi       | 1      | 1       | 0     |
| 3  | Kursi Besi/Material | 3      | 3       | 0     |
| 4  | Meja Kayu           | 3      | 3       | 0     |
| 5  | Sice                | 4      | 4       | 0     |
| 6  | Meja Rapat          | 18     | 18      | 0     |
| 7  | Meja Tulis          | 42     | 28      | 14    |
| 8  | Kursi Rapat         | 132    | 117     | 15    |
| 9  | Kursi Tamu          | 2      | 2       | 0     |
| 10 | Kursi Putar         | 53     | 47      | 6     |
| 11 | Kursi Lipat         | 69     | 47      | 22    |
| 12 | Meja Komputer       | 4      | 4       | 0     |
| 13 | Sofa                | 3      | 3       | 0     |

| NO | NAMA BARANG               | JUMLAH | KONDISI |       |
|----|---------------------------|--------|---------|-------|
|    |                           |        | BAIK    | RUSAK |
| 14 | Kursi Kerja               | 7      | 7       | 0     |
| 15 | Mesin Potong Rumput       | 2      | 0       | 2     |
| 16 | Tempat Sampah             | 3      | 3       | 0     |
| 17 | Lemari Es                 | 2      | 2       | 0     |
| 18 | AC                        | 16     | 14      | 2     |
| 19 | Alat Pendingin (AC Split) | 12     | 12      | 0     |
| 20 | Kipas Angin               | 14     | 7       | 5     |
| 21 | Kompor Gas                | 1      | 1       | 0     |
| 22 | Tabung Gas                | 1      | 1       | 0     |
| 23 | Dispenser                 | 9      | 8       | 1     |
| 24 | Microphone                | 2      | 2       | 0     |
| 25 | Microphone Table Stand    | 11     | 4       | 7     |
| 26 | Microphone/Wireless Mic   | 5      | 3       | 2     |
| 27 | Stand Microphone          | 2      | 2       | 0     |
| 28 | Tangga Aluminium          | 2      | 0       | 2     |
| 29 | Mesin Jilid               | 1      | 0       | 1     |
| 30 | Faximili                  | 1      | 1       | 0     |
| 31 | Screen                    | 1      | 1       | 0     |
| 32 | Mimbar pidato             | 1      | 1       | 0     |

Dari jumlah perlengkapan kantor tersebut tentunya perlu adanya penambahan perlengkapan kantor lainnya seperti genset, mengingat kantor Dinas Perhubungan memiliki daya listrik yang tinggi serta perlunya meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran.

#### 4) Peralatan Kantor

Peralatan kantor yang ada sementara cukup memadai namun perlu adanya peningkatan baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Dibawah ini peralatan kantor yang menunjang pelaksanaan tugas dan tanggungjawab para pegawai seperti disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.7  
Jumlah Peralatan Kantor Pada Dinas Perhubungan  
Kabupaten Ciamis

| NO | NAMA BARANG          | JUMLAH | KONDISI |       |
|----|----------------------|--------|---------|-------|
|    |                      |        | BAIK    | RUSAK |
| 1  | Kursi Kerja Pegawai  | 30     | 26      | 4     |
| 2  | Kursi Kerja Pejabat  | 35     | 25      | 10    |
| 3  | Meja Kerja           | 16     | 16      | 0     |
| 4  | Meja Biro            | 77     | 63      | 14    |
| 5  | Lemari Besi          | 15     | 11      | 4     |
| 6  | Filling Besi/Metal   | 13     | 10      | 3     |
| 7  | Lemari Kaca          | 6      | 6       | 0     |
| 8  | Lemari Kayu          | 6      | 4       | 2     |
| 9  | PC Unit/Komputer PC  | 24     | 11      | 13    |
| 10 | Laptop               | 13     | 10      | 3     |
| 11 | Printer              | 30     | 20      | 10    |
| 12 | Proyektor+attachment | 3      | 2       | 1     |
| 13 | Camera               | 4      | 4       | 0     |

### G. Anggaran

Alokasi anggaran yang dikelola Dinas Perhubungan pada tahun 2022 sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 58.307.301.416** dengan perincian untuk belanja operasi sebesar **Rp. 32.705.630.366** dan untuk belanja modal sebesar **Rp. 25.601.671.050**.

Jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar **Rp. 40.624.057.891** maka total alokasi anggaran pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 69,6%.

Sedangkan untuk rencana pendapatan asli daerah yang dikelola oleh Dinas Perhubungan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.8  
Target Pendapatan Asli Daerah  
Pada Dinas Perhubungan Tahun 2022

| No          | Jenis Pungutan  | Target               |
|-------------|---|----------------------|
| 1           | <b>Retribusi Jasa Umum</b>                                  | <b>2.345.770.000</b> |
| a.          | Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum                            | 725.770.000          |
| b.          | Pengujian Kendaraan Bermotor                                | 1.620.000.000        |
| 2           | <b>Retribusi Jasa Usaha</b>                                 | <b>426.225.000</b>   |
| a.          | Pemakaian Kekayaan Daerah                                   | 5.085.000            |
| b.          | Jasa Usaha Terminal   | 370.120.000          |
|             | Terminal Ciamis   | 165.370.000          |
|             | Terminal Sindangkasih                                       | 15.357.000           |
|             | Terminal Pamokolan  | 15.950.000           |
|             | Terminal Cisaga   | 8.124.000            |
|             | Terminal Banjarsari   | 36.427.000           |
|             | Terminal Pamarican  | 6.000.000            |
|             | Terminal Cimaragas  | 7.500.000            |
|             | Terminal Kawali   | 52.460.000           |
|             | Terminal Rancah   | 10.250.000           |
|             | Terminal Panjalu  | 30.000.000           |
|             | Terminal Cibeureum  | 4.107.000            |
|             | Terminal Panumbangan  | 18.575.000           |
| c.          | Tempat Khusus Parkir  | 51.020.000           |
| 3           | <b>Retribusi Bongkar Muat</b>                               | <b>49.976.000</b>    |
| a.          | Retribusi Penggunaan Jalan Bongkar Muat                     | 49.976.000           |
| 4           | <b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>                         | <b>24.070.000</b>    |
| a.          | Izin Trayek   | 24.070.000           |
| 5           | <b>Fasilitas Sosial Dan Fasilitas Umum</b>                  | <b>10.680.000</b>    |
| a.          | Fasilitas Umum  | 10.680.000           |
| 6           | <b>Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b> | -                    |
| a.          | Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah        | -                    |
| Jumlah..... |   | <b>2.856.721.000</b> |

## **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**

### **A. RENCANA STRATEGIS**

#### **1. VISI**

Tahun 2019 merupakan tahun transisi dari RPJMD sebelumnya ke RPJMD yang baru, dapat disampaikan bahwa Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis terdahulu merupakan gambaran masa depan yang diharapkan dan merupakan komitmen yang akan memotivasi segenap anggota organisasi dalam melaksanakan kegiatan dalam waktu minimal 3 (tiga) tahun ke depan yaitu Tahun 2017 – 2019. Sedangkan untuk pelaporan akuntabilitas kinerja pada tahun 2019 dokumen Rencana Strategis yang digunakan adalah Rencana Strategis 2019-2024 sehingga pernyataan visi yang ada yaitu mengacu kepada visi Bupati, yaitu "MANTAPNYA KEMANIDIRIAN EKONOMI SEJAHTERA UNTUK SEMUA."

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita setiap warga negara. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Ciamis. Dari pernyataan Visi tersebut didasarkan atas fakta-fakta dilapangan bahwa potensi bidang perhubungan di Kabupaten Ciamis memiliki peranan penting dalam mendukung pengembangan perekonomian sebagai roda penggerak. Sehingga jaringan jalan yang ada beserta perlengkapan jalan dan pengaturan trayek angkutan maupun jaringan lintas harus diintegrasikan dalam sebuah sistem, dengan demikian masing-masing instrumen dari sistem transportasi akan saling mendukung, selain itu visi Kabupaten Ciamis yang berorientasi pembangunan yang berbasis kepada pertanian dan pariwisata, dari segi transportasi memiliki dua dimensi karakteristik pergerakan yaitu

pergerakan yang bersifat lokal karena pariwisata dan pertanian berada pada lingkungan pedesaan, sedangkan karakteristik lainnya aktivitas pertanian dan pariwisata memiliki pergerakan yang luas baik yang berskala regional, nasional bahkan internasional.

Diharapkan dengan dibentuknya Dinas Perhubungan di Kabupaten Ciamis dapat menjadi motivasi seluruh elemen dinas untuk mewujudkannya, melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

## **2. MISI**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis merupakan lembaga yang akan menjalankan misi kepala daerah yang ke 3 yaitu "MENINGKATKAN KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR YANG Mendukung Pengembangan Wilayah."

## **3. TUJUAN**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Perhubungan di Kabupaten Ciamis.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis untuk Tahun 2021 menggunakan tujuan yang baru yaitu "Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan" serta "Meningkatkan Tata Kelola Perangkat Daerah Yang Efektif Dan Efisien Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas".

Dari tujuan yang telah ditetapkan oleh dinas, berikut ini adalah indikator dari tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Tujuan Dinas Perhubungan Tahun 2022

| NO | TUJUAN  | INDIKATOR TUJUAN                        | SATUAN   | REALISASI 2019 | TARGET |        |        |        |        |
|----|---|---|----------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |   |   |          |                | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| 1. | Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur secara merata   | Indeks keselamatan lalu lintas          | %        | 89,135         | 93,716 | 93,750 | 95,163 | 96,393 | 96,736 |
| 2. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah | Mutu     | Baik           | Baik   | Baik   | Baik   | Baik   | Baik   |
|    |   | Hasil Evaluasi AKIP Daerah              | Predikat | B              | BB     | BB     | BB     | BB     | BB     |
|    |   | Maturitas SPIP Daerah                   | Level    | 2              | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      |
|    |   | Kualitas Pelaporan Keuangan             | Predikat | WTP            | WTP    | WTP    | WTP    | WTP    | WTP    |

#### 4. SASARAN

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perhubungan dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Tahun 2022 adalah :

- a. Meningkatnya sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan angkutan darat yang berfungsi dengan baik
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah
- c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah  
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kapasitas organisasi perangkat daerah
- d. Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah

e. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah

Tabel 2.2  
Sasaran Dinas Perhubungan Tahun 2022

| NO | SASARAN  | INDIKATOR SASARAN   | SATUAN | REALISASI 2019 | TARGET |        |        |        |        |
|----|--|---|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |  |   |        |                | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| 1  | Meningkatnya sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan angkutan darat yang berfungsi dengan baik  | Persentase sarana/prasarana lalu lintas yang layak fungsi | %      | 84,222         | 92,195 | 92,262 | 93,714 | 95,075 | 95,762 |
|    |  | Persentase layanan angkutan darat yang layak fungsi       | %      | 94,048         | 95,238 | 95,238 | 96,612 | 97,711 | 97,711 |
| 2  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah  | Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Dinas Perhubungan        | Point  | 86,00          | 84,31  | 79,52  | 85,40  | 85,45  | 85,50  |
| 3  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah     | Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan                     | Point  | 71,72          | 73,79  | 71,80  | 71,85  | 71,90  | 71,95  |
| 4  | Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah | Hasil Level Maturitas SPIP Dinas Perhubungan              | Point  | 3              | 3      | 2,85   | 3      | 3      | 3      |

|   |   |  |       |     |     |     |     |     |     |
|---|---|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 5 | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah | Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan Dinas Perhubungan | Point | 950 | 836 | 758 | 750 | 775 | 800 |
|---|---|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

## 5. PROGRAM DAN KEGIATAN

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran setelah adanya arah kebijaksanaan yaitu penentuan sebagai berikut :

### a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

### b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

- 1) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- 2) Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
- 3) Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 4) Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- 5) Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Program/Kegiatan Urusan Perhubungan Yang Mendukung Misi Pembangunan Daerah yaitu :

Misi 3 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah

**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**

1. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
3. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
4. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
5. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Didalam program tersebut dapat dijabarkan pada kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2022, diantaranya :

**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir Tahun SKPD

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Sub Kegiatan Bahan Penyediaan Logistik Kantor
  - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

## **2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**

- a. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
- b. Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
  - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
- c. Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
  - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
- d. Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
  - Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
  - Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- e. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
  - Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
- f. Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
  - Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan

Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor  
Kabupaten/Kota

- g. Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
- h. Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

## **B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis pada tahun anggaran 2022, selanjutnya disusun Perjanjian Kinerja (PK). Perjanjian kinerja berisikan penetapan target kinerja untuk masing-masing indikator kinerja pada setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Perjanjian kinerja Dinas Perhubungan pada dasarnya merupakan dokumen kontrak kinerja antara Bupati Ciamis dengan Kepala Dinas Perhubungan yang dirumuskan bersama pada awal tahun anggaran yang harus dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perhubungan. Namun demikian karena pada tahun 2022 ini Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis juga mendapatkan anggaran perubahan, maka terhadap kontrak kinerja yang telah dibuat bersama dengan Bupati mengalami beberapa penyesuaian khusus pada indikator-indikator kinerja yang target kerjanya mengalami perubahan. Perubahan perjanjian kinerja sehubungan dengan adanya perubahan anggaran tersebut tetap merupakan satu kesatuan dokumen penetapan kinerja yang tidak terpisahkan untuk tahun yang bersangkutan.

## 1. Perjanjian Kinerja Sesuai Sasaran Strategis

Penetapan kinerja untuk masing-masing sasaran strategis sesuai kontrak kinerja dan perubahan anggaran pada tahun 2022, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Target Kinerja berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2022

| NO | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA   | TARGET | KEGIATAN   |
|----|---|---|--------|--|
| 1  | Meningkatnya sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan angkutan darat yang berfungsi dengan baik         | Persentase sarana/prasarana lalu lintas yang layak fungsi | 93,714 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota; Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota  |
|    |   | Persentase layanan angkutan darat yang layak fungsi       | 96,612 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C; Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  |
| 2  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah   | Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Dinas Perhubungan        | 85,40  | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| 3  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi an, | Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan                     | 71,85  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |

| NO | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA                                      | TARGET | KEGIATAN   |
|----|--|--|--------|--|
|    | pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah  |  |        |  |
| 4  | Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah | Hasil Level Maturitas SPIP Dinas Perhubungan           | 3      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| 5  | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah  | Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan Dinas Perhubungan | 750    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           |

## 2. Sasaran Strategis Pada IKU

Sesuai Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Nomor : 700/KPTS/1245/Dishub.2 tanggal 09 Oktober 2019, Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis telah menetapkan indikator kinerja utama untuk masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Adapun penetapan kinerja sasaran strategis pada indikator kinerja utama untuk tahun 2022 adalah merupakan sasaran strategis sesuai Rencana Strategis Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

Tabel 2.4  
Sasaran Strategis Terhadap IKU

| NO | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                   | TARGET | KEGIATAN  |
|----|--|---|--------|---|
| 1  | Meningkatnya sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan angkutan darat yang berfungsi dengan baik  | Persentase sarana/prasarana lalu lintas yang layak fungsi | 93,714 | Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota; Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota   |
|    |  | Persentase layanan angkutan darat yang layak fungsi       | 96,612 | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C; Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |
| 2  | Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah | Level maturitas SPIP                                      | 3      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |
| 3  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah     | Hasil evaluasi AKIP                                       | 71,85  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |
| 4  | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah  | Kualitas pelaporan keuangan                               | 750    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |
| 5  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                          | 85,4   | Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah  |

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET | KEGIATAN   |
|----|-------------------|-------------------------|--------|--|
|    |                   |                         |        | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;<br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;<br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah<br>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |

## **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. Capaian Kinerja**

#### **1. Target Dan Realisasi Kinerja**

Dalam rangka melaksanakan pembangunan berbasis kinerja, yang paling utama adalah bahwa pembangunan harus berorientasi pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Tentunya dalam pelaksanaannya bahwa fokus membangun bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang telah direncanakan namun esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah berorientasi untuk mendorong ke arah perbaikan dimana program dan kegiatan serta sumber daya anggaran merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang mana salah satu pilarnya yaitu akuntabilitas dari instansi pemerintahan yang diukur agar dapat dilihat sejauh mana instansi tersebut telah memenuhi tugas dan kewenangannya dalam penyediaan layanan kepada publik yang mana hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Sehingga perlu adanya laporan secara berkala terhadap pencapaian sasaran yang diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan program/kegiatan sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan yang akan datang.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa pentingnya merumuskan sasaran strategis dari perangkat daerah melalui indikator kinerja.

Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Karakteristik indikator kinerja dari Dinas Perhubungan bersifat positif yang artinya adalah semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik. Untuk skala pengukuran kinerja

dan predikatnya berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

Tabel.3.1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Kode |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|------|
| 1  | $\geq 90,1$                      | Sangat Tinggi                        |      |
| 2  | $75,1 \leq 90,0$                 | Tinggi                               |      |
| 3  | $65,1 \leq 75,0$                 | Sedang                               |      |
| 4  | $50,1 \leq 65$                   | Rendah                               |      |
| 5  | $\leq 50,0$                      | Sangat Rendah                        |      |

Secara umum Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang dianalisis menggunakan pendekatan :

- a. Capaian Sasaran Strategis Terhadap Indikator Kinerja Utama  
Sesuai Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Nomor : 700/KPTS/1245/Dishub.2 tanggal 09 Oktober 2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Dinas Perhubungan Tahun 2019-2024, dibawah ini target dan realisasi capaian strategis terhadap indikator kinerja utama sebagai berikut :

Tabel 3.2  
Analisis Capaian Sasaran Strategis Tahun 2022  
Terhadap Indikator Kinerja Utama

| NO        | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                   | SATUAN | TARGET | REALISASI | %            |
|-----------|--|---|--------|--------|-----------|--------------|
| 1         | Meningkatnya sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan angkutan darat yang berfungsi dengan baik  | Persentase sarana/prasarana lalu lintas yang layak fungsi | %      | 93,714 | 80,848    | 86,27        |
|           |  | Persentase layanan angkutan darat yang layak fungsi       | %      | 96,612 | 100,00    | 103,50       |
| 2         | Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                          | Point  | 85,40  | 80,59     | 94,36        |
| 3         | Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah     | Hasil LHE AKIP Dinas Perhubungan                          | Point  | 71,85  | 67,56     | 94,02        |
| 4         | Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah | Level Maturitas SPIP Dinas Perhubungan                    | Point  | 3      | 3         | 100,00       |
| 5         | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah  | Kualitas Laporan Keuangan Dinas Perhubungan               | Point  | 750    | 754,56    | 100,60       |
| Rata-Rata |  |   |        |        |           | <b>96,46</b> |

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 6 (enam) indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Tahun 2022 disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran predikatnya Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 96,46 %. Adapun rincian capaian dari masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3  
Analisis Capaian Masing-Masing Sasaran Strategis Terhadap Indikator Kinerja Utama

| NO | SASARAN STRATEGIS  | SATUAN | CAPAIAN % |
|----|--|--------|-----------|
| 1  | Meningkatnya sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan angkutan darat yang berfungsi dengan baik  | %      | 95,020    |
| 2  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah  | %      | 94,368    |
| 3  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah     | %      | 94,029    |
| 4  | Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah | %      | 100,000   |
| 5  | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah  | %      | 100,608   |

b. Capaian Sasaran Strategis Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Pengukuran pada perjanjian kinerja tahun 2022 merupakan analisis terhadap kontrak kerja kepala dinas dengan kepala daerah (Bupati). Target yang digunakan merupakan target perjanjian kinerja perubahan, hal ini dikarenakan dinas

perhubungan melakukan penyesuaian dan review terhadap beberapa program dan kegiatan yang disesuaikan dengan skala prioritas yang akan dicapai pada akhir tahun 2022. Pengukuran kinerja pada perjanjian kinerja disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4  
Analisis Capaian Sasaran Strategis Terhadap  
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

| NO | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                   | SATUAN | TARGET | REALISASI | %       |
|----|---|---|--------|--------|-----------|---------|
| 1  | Meningkatnya sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan angkutan darat yang berfungsi dengan baik   | Persentase sarana/prasarana lalu lintas yang layak fungsi | %      | 93,714 | 80,848    | 86,271  |
|    |   | Persentase layanan angkutan darat yang layak fungsi       | %      | 96,612 | 100,00    | 103,507 |
| 2  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah   | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                          | Point  | 85,40  | 80,59     | 94,368  |
| 3  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi an, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah | Hasil LHE AKIP Dinas Perhubungan                          | Point  | 71,85  | 67,56     | 94,029  |
| 4  | Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan  | Level Maturitas SPIP Dinas Perhubungan                    | Point  | 3      | 3         | 100,000 |

| NO        | SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA UTAMA                     | SATUAN | TARGET | REALISASI | %            |
|-----------|---|---|--------|--------|-----------|--------------|
|           | dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah |   |        |        |           |              |
| 5         | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah   | Kualitas Laporan Keuangan Dinas Perhubungan | Point  | 750    | 754,56    | 100,608      |
| Rata-Rata |   |   |        |        |           | <b>96,46</b> |

Hasil analisa dari tabel tersebut dari 9 (sembilan) indikator capaiannya sangat tinggi dengan rata-rata capaian sebesar 96,46%, sedangkan capaian dari masing-masing sasaran strategis yang diperjanjikan pada tahun 2022 yaitu :

Tabel 3.5  
Analisis Capaian Masing-Masing Sasaran Strategis  
Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2022

| NO | SASARAN STRATEGIS   | SATUAN | CAPAIAN% |
|----|---|--------|----------|
| 1  | Meningkatnya sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan angkutan darat yang berfungsi dengan baik | %      | 95,020   |
| 2  | Meningkatnya pelayanan angkutan umum  | %      | 94,368   |
| 3  | Meningkatnya kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor  | %      | 94,029   |
| 4  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kapasitas organisasi perangkat daerah                            | %      | 100,000  |
| 5  | Meningkatnya kinerja organisasi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat           | %      | 100,608  |

Dari tabel tersebut di atas capaian dari masing masing sasaran predikatnya sangat tinggi dengan rata-rata capaian sebesar 96,80%.

c. Perkembangan Capaian Sasaran Strategis

Selama 4 (empat) tahun terakhir kinerja dari Dinas Perhubungan terhadap capaian kinerja dari tahun sebelumnya serta perbandingan terhadap perjanjian kinerja tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

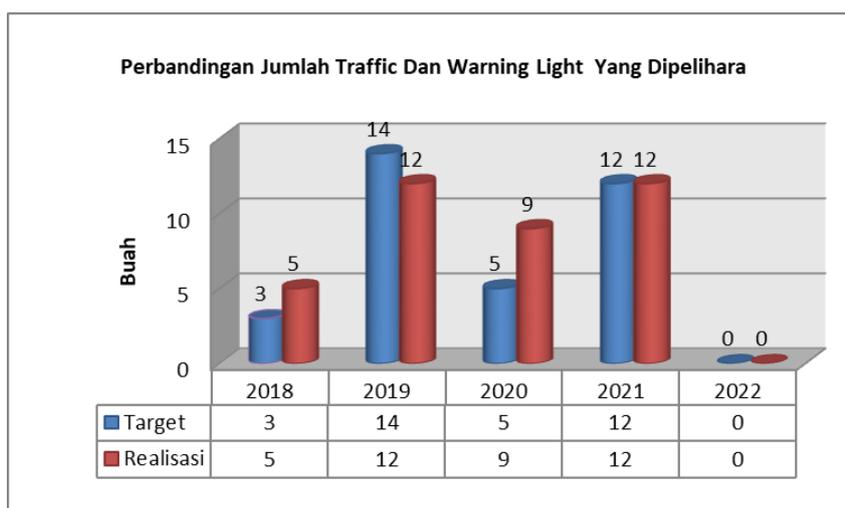
Meningkatnya sarana prasarana keselamatan lalu lintas dan angkutan darat yang berfungsi dengan baik, seperti yang telah digambarkan pada capaian realisasi indikator kinerja pada perjanjian kinerja tahun 2022, untuk sasaran strategis “Meningkatnya sarana prasarana keselamatan lalu lintas dan angkutan darat yang berfungsi dengan baik” diukur melalui 2 (dua) indikator seperti uraian dibawah ini :

A. Persentase sarana/prasarana lalu lintas yang layak fungsi

- a) Jumlah traffic light dan warning light yang dipelihara pada tahun 2022 tidak ada.

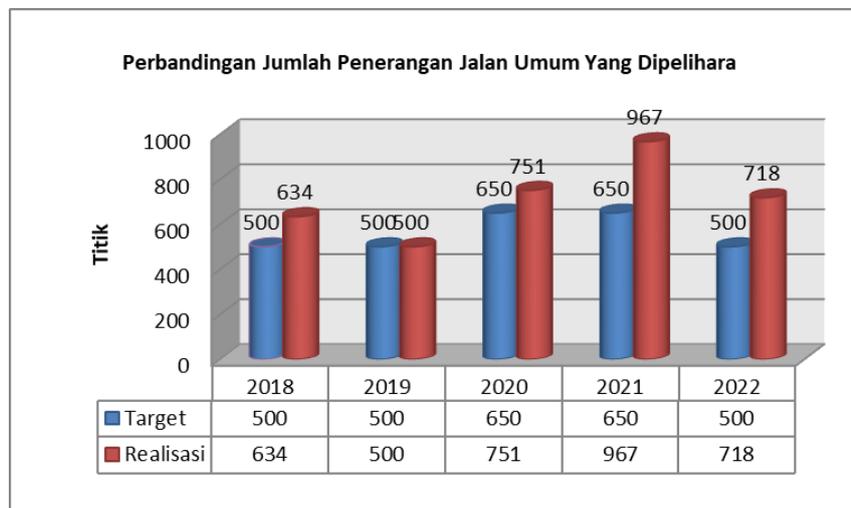
Jika dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya capaiannya indikator ini dapat dilihat pada grafik seperti rincian dibawah ini:

Gambar 3.1  
Perbandingan Capaian Jumlah Traffic Dan Warning Light Yang Dipelihara



- b) Jumlah penerangan jalan umum yang dipelihara menurut laporan hasil pelaksanaan kegiatan terdapat 718 titik yang dipelihara dilokasi yang tersebar di seluruh kabupaten Ciamis. Rincian perbandingan terhadap pemeliharaan penerangan jalan umum digambarkan pada grafik dibawah ini :

Gambar 3.2  
Perbandingan Jumlah Penerangan Jalan Umum Yang Dipelihara



Capaian tahun ini banyak usulan perbaikan terhadap penerangan jalan umum namun tenaga teknis lapangan dalam menentukan perbaikan berdasarkan skala prioritas dan tingkat urgensi. Sehingga untuk tahun ini lebih difokuskan pada perbaikan secara optimal sampai dengan lampu menyala. Meski demikian baik tahun lalu dan sekarang realisasinya mencapai target yang ditetapkan, dan capaian tahun ini sebesar 143,6 %.

- c) Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang dipasang, target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja yaitu sebanyak 528 buah rambu lalu lintas, yang terdiri dari :
- Rambu Ukuran 60 : 14 buah
  - Warning Light : 3 unit
  - Cermin Tikungan : 11 buah

- Marka Jalan : 500 meter (10 lokasi)

Hasil capaian dari tahun awal renstra tingkat capaiannya tiap tahun mengalami peningkatan selain karena memang adanya kegiatan penambahan fasilitas keselamatan baik yang didanai oleh APBD Kabupaten juga adanya bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat. Capaiannya dari tahun 2017 s/d 2019 dan 2021 mengalami peningkatan sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan, dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Gambar 3.3  
Perbandingan Jumlah Rambu Lalu Lintas Yang Dipasang



Dari ilustrasi grafik di atas rata-rata capaian jumlah fasilitas keselamatan yang dipasang untuk tahun 2017 s/d 2019 dan 2021 capaiannya selalu melebihi dari target yang ditetapkan, sedangkan untuk tahun 2020 capaiannya tidak sesuai dengan target yang ditetapkan karena indikator targetnya rambu standar, adapun pelaksanaannya menyesuaikan kebutuhan seperti halnya pemasangan RPPJ yang dilihat dari segi harga jauh lebih mahal dari rambu standar sehingga realisasi outputnya menjadi lebih sedikit.

- Jumlah ruas jalan kabupaten yang sudah dilengkapi fasilitas keselamatan, capaiannya yaitu sebanyak 100,00%

hal ini dikarenakan adanya kegiatan pemasangan fasilitas keselamatan pada beberapa ruas jalan kabupaten.

Sedangkan untuk pemasangan fasilitas keselamatan selain yang dibiayai dari Pemerintah Kabupaten Ciamis, pemerintah kabupaten melalui Dinas Perhubungan juga mendapat bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke beberapa ruas jalan kabupaten. Sehingga perkembangan capaian ruas jalan kabupaten yang sudah dilengkapi fasilitas keselamatan yaitu dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

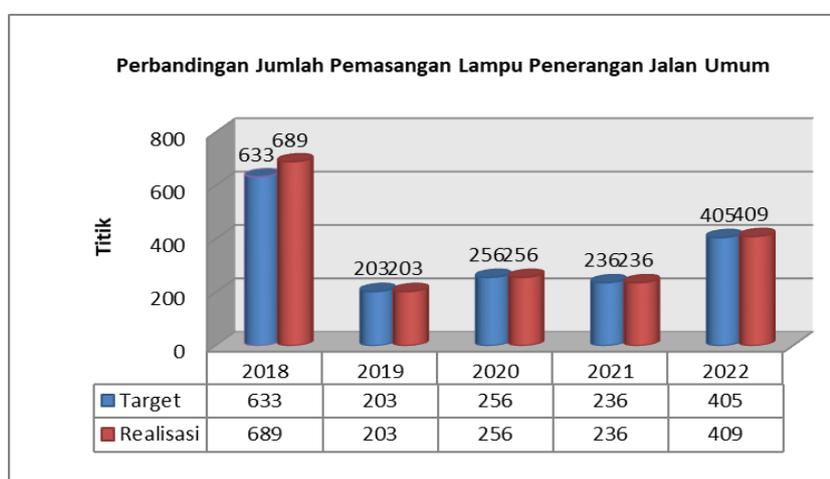
Gambar 3.4  
Perbandingan Ruas Jalan Kabupaten Yang Sudah Dilengkapi Fasilitas Keselamatan



Dari grafik tersebut di atas secara akumulasi jumlah ruas jalan kabupaten yang sudah dilengkapi fasilitas keselamatan lalu lintas mencapai 100,00% dari 186 ruas yang ditargetkan direalisasi sebanyak 186 ruas jalan, hal ini dikarenakan Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis mendapat bantuan keuangan provinsi Jawa Barat yang memang diperuntukan untuk kegiatan pengadaan fasilitas keselamatan seperti rambu lalu lintas dan pagar pengaman jalan. Adapun ruas jalan kabupaten yang sudah dilengkapi fasilitas keselamatan tersebar di Ruas Jalan Kabupaten Ciamis.

- e) Jumlah pemasangan lampu penerangan jalan umum, baik dari tahun sebelumnya dan tahun ini capaian pemasangan penerangan jalan umum selalu melebihi target hal ini dikarenakan baik pada tahun 2018, 2021 maupun tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui Dinas Perhubungan menerima bantuan teknis pemasangan penerangan jalan umum dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ilustrasi capaiannya dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Gambar 3.5  
Perbandingan Jumlah Pemasangan  
Lampu Penerangan Jalan Umum



Rincian pemasangan lampu penerangan jalan umum yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Ciamis tersebar di Kabupaten Ciamis dengan rincian :

Tabel 3.6  
Data Realisasi Pemasangan PJU Tahun 2022

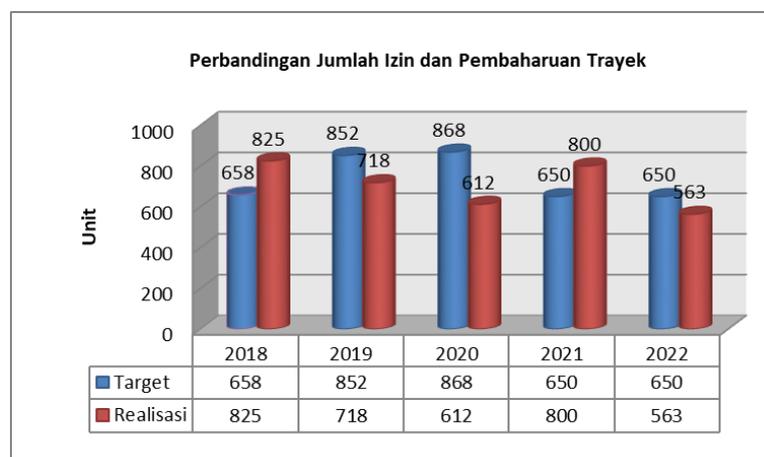
| NO  | KECAMATAN    | REALISASI PEMASANGAN |
|-----|--------------|----------------------|
| 1.  | Ciamis       | 123                  |
| 2.  | Cikoneng     | 2                    |
| 3.  | Cijeungjing  | 10                   |
| 4.  | Baregbeg     | 9                    |
| 5.  | Sadananya    | 7                    |
| 6.  | Cimaragas    | 1                    |
| 7.  | Cidolog      | 6                    |
| 8.  | Sindangkasih | 9                    |
| 9.  | Panumbangan  | 19                   |
| 10. | Panjalu      | 10                   |

|               |             |     |
|---------------|-------------|-----|
| 11.           | Cihaurbeuti | 2   |
| 12.           | Sukamantri  | 18  |
| 13.           | Kawali      | 22  |
| 14.           | Lambung     | 2   |
| 15.           | Cipaku      | 1   |
| 16.           | Panawangan  | 24  |
| 17.           | Jatinagara  | 2   |
| 18.           | Rajadesa    | 34  |
| 19.           | Sukadana    | 3   |
| 20.           | Rancah      | 39  |
| 21.           | Tambaksari  | 5   |
| 22.           | Cisaga      | 13  |
| 23.           | Banjarsari  | 12  |
| 24.           | Banjaranyar | 11  |
| 25.           | Pamarican   | 12  |
| 26.           | Lakbok      | 3   |
| 27.           | Purwadadi   | 5   |
| <b>JUMLAH</b> |             | 409 |

B. Persentase layanan angkutan darat yang layak fungsi, seperti yang telah digambarkan pada capaian realisasi indikator kinerja pada perjanjian kinerja tahun 2022, untuk sasaran strategis seperti uraian dibawah ini :

a) Jumlah izin dan pembaharuan trayek, dari hasil pelaksanaan kegiatan penerbitan perpanjangan izin trayek dan pembaharuan (kartu pengawasan) capaiannya rata-rata selama 5 (lima) tahun terakhir seperti ilustrasi pada grafik dibawah ini :

Gambar 3.6  
Jumlah Izin dan Pembaharuan Trayek

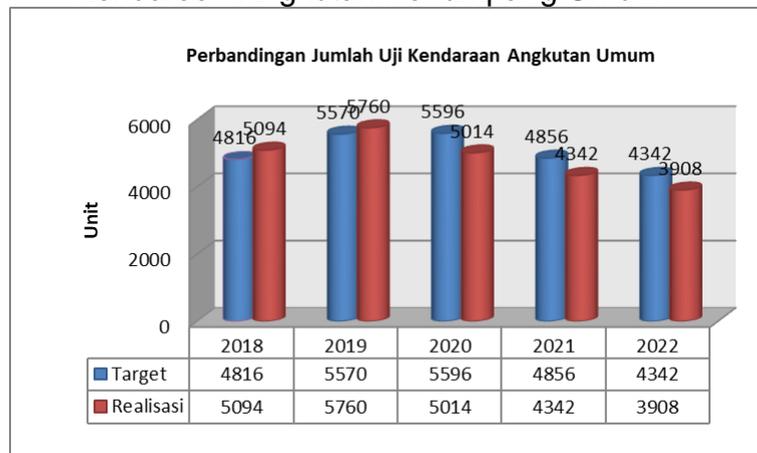


Dari grafik tersebut di atas dapat diketahui capaiannya pada tahun 2022 sekitar 86,62%. Untuk realisasi capaian indikator kinerja ini tentunya dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu kepatuhan dan kesadaran dari pemilik kendaraan angkutan penumpang umum untuk melaksanakan tertib administrasi operasional angkutan umum.

- b) Jumlah uji KIR angkutan umum, selama kurun waktu 4 (empat) tahun dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Gambar 3.7

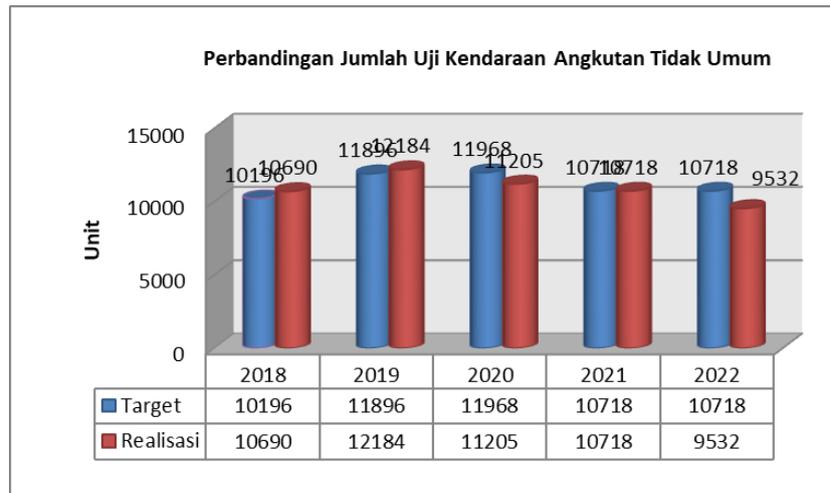
Perbandingan Capaian Uji KIR  
Kendaraan Angkutan Penumpang Umum



Dari grafik tersebut pada tahun 2022 mencapai 90,00 %, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan bahwa capaiannya tidak mencapai dari target yang ditetapkan. Capaian ini tentunya sangat bergantung dari kesadaran dan kepatuhan dari pemilik kendaraan angkutan umum wajib uji untuk melaksanakan KIR bagi kendaraan dalam menjamin keselamatan di jalan.

- c) Jumlah uji KIR angkutan tidak umum, selama kurun waktu 4 (empat) tahun dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

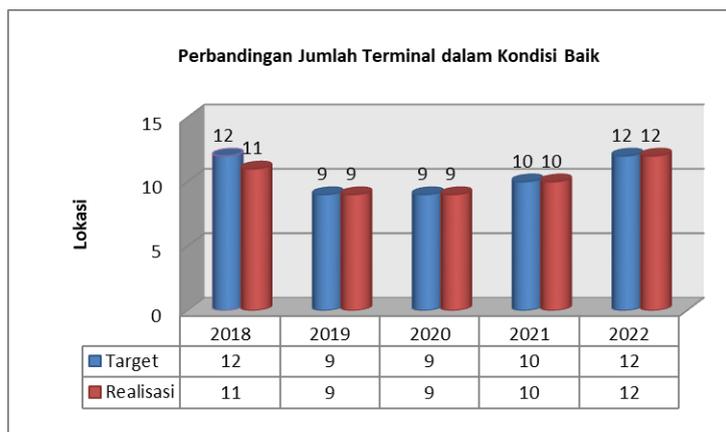
Gambar 3.8  
Perbandingan Jumlah Uji Kendaraan Angkutan  
Tidak Umum



Dari grafik tersebut untuk tahun 2022 dapat diketahui baik jumlah uji KIR angkutan umum mencapai 90,00% dari target sebanyak 4.342 unit terealisasi 3.908 unit, sedangkan uji KIR angkutan tidak umum mencapai 88,93% dari 10.718 unit kendaraan terealisasi 9.532 unit.

- A. Jumlah terminal dalam kondisi baik, pada tahun 2022 capaian realisasinya yaitu 100,00% atau sesuai target. Perkembangan capaian jumlah terminal dalam kondisi baik dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Gambar 3.9  
Perbandingan Jumlah Terminal Dalam Kondisi Baik



Dari grafik tersebut dapat diketahui perbandingan pada tahun 2018 sampai dengan 2022 Jumlah terminal yang

dapat beroperasi/ berfungsi mengalami kenaikan, sedangkan beberapa permasalahan karena adanya beberapa faktor :

- Perubahan alih fungsi dari terminal menjadi pusat kegiatan ekonomi (pasar). Hal ini karena adanya revitalisasi pasar Banjarsari sehingga berdampak pada pergeseran lokasi terminal Banjarsari. Sebagai informasi awal Dinas Perhubungan telah melaksanakan kegiatan DED Pembangunan Terminal Banjarsari pada tahun 2018 dan akan mengusulkan rencana pembangunannya pada tahun anggaran 2023 melalui bantuan keuangan provinsi Jawa Barat.
- Perubahan fungsi terminal Cimaragas menjadi ruang terbuka publik.
- Terminal Cibeureum yang berada di Kecamatan Sukamantri mengalami penurunan untuk aktifitas pelayanan angkutan umum.

B. Jumlah alat uji yang berfungsi, untuk tahun 2022 direalisasi sebanyak 100,00% sesuai pada grafik dibawah ini :

Gambar 3.10  
Perbandingan Jumlah Alat Uji Yang Berfungsi

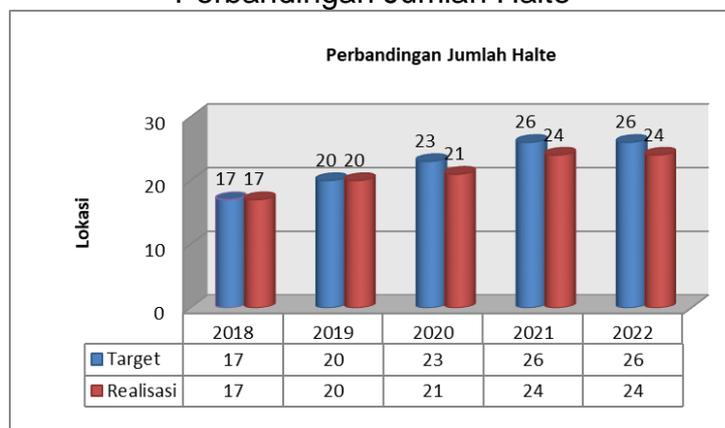


Dari grafik tersebut dapat dilaporkan alat uji yang berfungsi tersebut yaitu :

- 1) Alat uji emisi CO/HC (Gas Analyzer)
- 2) Alat uji ketebalan asap
- 3) Alat uji lampu utama (Headlight Tester)
- 4) Alat uji berat
- 5) Alat uji penunjuk kecepatan (Speedometer)
- 6) Alat uji kincup roda depan (Side Slip Tester)
- 7) Alat uji tingkat suara (Sound Level)
- 8) Alat uji kegelapan kaca (Tint Tester)
- 9) Alat uji rem (Brake Tester)
- 10) Alat uji emisi CO/HC (Gas Analyzer)
- 11) Alat uji pengukur dimensi kendaraan
- 12) Alat uji pengukur kedalaman alur ban

C. Jumlah Halte/Shelter, fasilitas prasarana halte yang ada selain dari APBD Kabupaten Ciamis juga dibangun oleh pihak swasta. Pada tahun 2022 jumlah halte/shelter masih sama seperti tahun sebelumnya dengan prosentase mencapai 92,31% secara kumulatif dari tahun 2017-2021 dari target sebanyak 26 buah terealisasi sebanyak 24 buah, diketahui bahwa capaiannya tidak mencapai dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena adanya refocusing anggaran pada Tahun Anggaran 2022. Dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Gambar 3.11  
Perbandingan Jumlah Halte



Dari capaian tersebut di atas dibawah ini lokasi halte/shelter seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.7  
Lokasi Halte/Shelter

| No | Ruas Jalan                         | Volume (Lokasi) | Lokasi                     |
|----|------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| 1  | Jl.Jend. Sudirman                  | 6               | SDN 1 Sindangrasa          |
|    |                                    |                 | SMP N 6 Ciamis             |
|    |                                    |                 | SMP N 3 Ciamis             |
|    |                                    |                 | SD N Janggala              |
|    |                                    |                 | SMK N 1 Ciamis             |
|    |                                    |                 | SMP N 5 Ciamis             |
| 2  | Jl.lwa K                           | 1               | Depan Organda              |
| 3  | Jl. Pasar Shubuh                   | 1               | Pasar Shubuh               |
| 4  | Jl. Ciptomangunkusumo              | 1               | SD N 7 Ciamis              |
| 5  | Jl.Tjokro                          | 1               | SD N 2 Ciamis              |
| 6  | Jl. Ir. H. Juanda                  | 2               | Taman Lokasana             |
|    |                                    |                 | Kancab BRI                 |
| 7  | Jl.Stasiun                         | 2               | Yogya Dept.Store           |
| 8  | Jl.RE.Martadinata                  | 1               | Kampus UNIGAL              |
| 9  | Jl. Yos Sudarso                    | 1               | Taman Yodas                |
| 10 | Ruas Jalan Ciamis-Cirebon (Kawali) | 1               | Taman Surawisesa           |
| 11 | Banjarsari                         | 1               | Masjid Agung               |
| 12 | Ruas Jalan Cisaga                  | 1               | Desa Mekar Mukti           |
| 13 | Ruas Jalan Cijeungjing             | 1               | Desa Bojong                |
| 14 | Jalan menuju ke Sukadana           | 1               | Depan Puskesmas Baregbeg   |
| 15 | Ruas Cimaragas                     | 1               | Komplek Terminal Cimaragas |
| 16 | Ruas Jalan Pamalayan               | 1               | SD N 1 Pamalayan           |
| 17 | Jl. Jenderal Soedirman             | 1               | SMK Bakti Kencana          |

C. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kapasitas organisasi perangkat daerah terdapat 4 indikator yaitu :

- a) Level Maturitas SPIP, yang ditargetkan yaitu 3 point dan sesuai review inspektorat untuk maturitas SPIP Dinas Perhubungan dengan capaian 3 point. Sehingga capaian pada indikator ini mencapai 100% sesuai yang ditargetkan.

- b) Hasil Evaluasi AKIP, untuk evaluasi AKIP realisasi yang digunakan adalah penilaian untuk evaluasi AKIP tahun 2022 dengan nilai capaian 71,85 point sesuai dengan target yaitu 67,56 point, sehingga hasil capaiannya mencapai 94,03%.
- c) Kualitas Pelaporan Keuangan, untuk kualitas pelaporan realisasi yang digunakan adalah penilaian untuk kualitas pelaporan keuangan tahun 2022 dengan nilai capaian 754,56 point sedangkan yang ditargetkan adalah 750 point, sehingga hasil capaian hanya mencapai 100,61%.
- d) Hasil nilai capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perhubungan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Adapun realisasi capaian pada tahun 2022 yaitu sebesar 94,37% sangat tinggi. Target capaian yaitu 85,40 point hanya terealisasi 80,59 point namun demikian pelayanan perhubungan masuk pada kategori BAIK

## 2. Analisis Keberhasilan Capaian Kinerja Sasaran

Dari 5 (lima) sasaran strategis yang telah ditetapkan baik yang dianalisis terhadap indikator kinerja utama maupun realisasi pengukuran perjanjian kinerja capaiannya mencapai di atas 100,00% seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.8  
Capaian Sasaran Strategis

| No | Sasaran Strategis   | Terhadap IKU (%) | Terhadap PK (%) |
|----|---|------------------|-----------------|
| 1  | Meningkatnya sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan angkutan darat yang berfungsi dengan baik | 95,020           | 95,020          |
| 2  | Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah   | 94,368           | 94,368          |
| 3  | Meningkatnya akuntabilitas  | 94,029           | 94,029          |

|   |  |         |         |
|---|--|---------|---------|
|   | kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah                                |         |         |
| 4 | Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah | 100,000 | 100,000 |
| 5 | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat dae   | 100,608 | 100,608 |

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan keberhasilan yang dicapai, catatan penting serta hal-hal yang harus dilakukan untuk rekomendasi yang akan datang seperti pada uraian dibawah ini :

a. Meningkatnya sarana prasarana keselamatan lalu lintas yang terpasang dengan baik.

1) Keberhasilan

Pemerintah provinsi maupun pusat dan pemerintah daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir selalu memberikan bantuan teknis terkait pengadaan fasilitas keselamatan. Baik itu pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas, Pengadaan dan pemeliharaan penerangan jalan umum maupun pengadaan warning light. Hal ini merupakan keberhasilan mengingat tidak semua pemerintah kab/kota mendapatkan bantuan teknis tersebut.

2) Catatan penting

Dalam hal menyusun usulan kepada pemerintah provinsi dan pusat harus disertai data kebutuhan yang akurat serta diusahakan dilengkapi dengan titik ordinat.

3) Upaya yang dilakukan

- Dinas harus selalu berkesinambungan mengusulkan bantuan fasilitas keselamatan baik ke Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat maupun Kementerian Perhubungan.

- Konsisten dalam melaksanakan rencana aksi daerah terkait peningkatan keselamatan jalan sehingga menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat maupun provinsi untuk memberikan bantuan teknis.
- Beberapa kegiatan yang mendukung capaian sasaran 1 :

Gambar 3.12  
Dokumentasi Kegiatan Yang Mendukung Sasaran 1



b. Meningkatnya pelayanan angkutan umum

1) Keberhasilan

- Kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi penyelenggaraan angkutan penumpang umum dan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan masih bisa ditolerir meskipun ada beberapa yang terkadang belum konsisten.
- Terkait pelayanan pengujian kendaraan bermotor didukung juga oleh perjanjian kerjasama tentang penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Pangandaran di Kabupaten Ciamis.
- Dari hasil data Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2022 penilaian masyarakat terhadap Pelayanan

Bidang Angkutan, Pelayanan Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan, Pelayanan Bidang Lalu Lintas, Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, Pelayanan Parkir, Pelayanan Terminal yang mendapat nilai 80,59 point dengan mutu pelayanan “BAIK”. Selengkapnya data analisa Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dilihat pada lampiran.

2) Catatan Penting

Perlu dilakukan pemahaman kepada pemilik kendaraan angkutan penumpang umum terhadap penyelenggaraan operasional angkutan penumpang umum dan pemahaman terhadap pemilik kendaraan wajib uji baik umum maupun tidak umum.

3) Upaya yang dilakukan

- Dilaksanakannya kegiatan pemantauan dan pembinaan kepada pemilik angkutan umum.
- Melakukan *ramp check* kepada pemilik kendaraan wajib uji.
- Beberapa kegiatan yang mendukung capaian sasaran :

Gambar 3.13

Dokumentasi yang mendukung capaian sasaran 2





c. Meningkatnya keandalan sarana dan prasarana LLAJ

1) Keberhasilan

- Kabupaten Ciamis mendapat nilai dengan kategori “B” dalam rangka penilaian akreditasi terhadap unit pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang artinya unit pengujian kendaraan bermotor yang dimiliki Kabupaten Ciamis layak untuk beroperasi.
- Terminal yang ada yaitu sebanyak 9 (sembilan) lokasi dalam kondisi yang baik.

2) Catatan Penting

- Unit pelayanan pengujian kendaraan bermotor harus selalu ditingkatkan baik sarana alat uji maupun prasarana gedungnya mengingat ini merupakan poin persyaratan yang harus dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan pengujian kendaraan bermotor. Selain itu juga perlu adanya tambahan sumber daya manusia dengan kompetensi
- dan kualifikasi sebagai tenaga Penguji Kendaraan Bermotor.
- Untuk terminal Banjarsari dan Cimaragas perlu dilakukan pembangunannya karena operasional terhadap penyelenggaraan angkutan penumpang tetap berjalan meskipun saat ini Dinas Perhubungan masih

menggunakan lahan dan kantor sementara milik UPTD Pasar di Banjarsari. Sedangkan untuk pembangunan terminal Cimaragas diperlukan penentuan lokasi dan kajian lanjutan seperti *feasibility study* (FS) dan *detail engineering design* (DED).

3) Upaya yang dilakukan

- Beberapa poin penting yang menjadi catatan pada saat akreditasi terhadap UPPKB di Ciamis yaitu sudah dilaksanakannya transaksi non tunai untuk pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor melalui EDC menggunakan produk *Brizzi* yang dikeluarkan oleh bank persepsi BRI Kantor Caba-+ng Ciamis. Ini merupakan nilai plus bagi pemerintah Kabupaten Ciamis pada saat penialaian akreditasi tersebut karena di Indonesia belum ada yang melaksanakannya.
- Terhadap ketersediaan SDM penguji kendaraan bermotor dinas sudah mengajukan usulan formasi kepada Bupati Ciamis melalui BKPSDM Kabupaten Ciamis, untuk sementara ketersediaan SDM penguji kendaraan bermotor dibantu secara teknis oleh penguji dari Kabupaten Pangandaran sesuai perjanjian kerjasama dengan Kabupaten Pangandaran dan beberapa tenaga teknis penguji non-PNS.

**3. Analisis Atas Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran (Akhir Periode Renstra)**

Indikator dari sasaran strategis yang telah dianalisis capaiannya pada tahun 2022 juga dianalisis terhadap target pada rencana strategis. Untuk urusan perhubungan realisasi sampai dengan tahun 2022 terhadap target capaian akhir renstra sebagai berikut :

Tabel 3.9  
Capaian Indikator Kinerja Terhadap Target Renstra

| No | Indikator   | Target Akhir Renstra (2022) | Realisasi (2022) | Ket |
|----|---|-----------------------------|------------------|-----|
| 1. | Jumlah pemasangan penerangan jalan umum                         | 158                         | 409              | Y   |
| 2. | Jumlah penerangan jalan umum yang dipelihara                    | 500                         | 718              | Y   |
| 3. | Jumlah fasilitas keselamatan (rambu lalu lintas) yang dipasang  | 50                          | 41               | T   |
| 4. | Jumlah traffic light, warning light, APILL ATCS yang dipelihara | 1                           | 1                | Y   |
| 5. | Jumlah izin dan pembaharuan trayek                              | 650                         | 563              | T   |
| 6. | Jumlah uji KIR kendaraan angkutan umum dan tidak umum           | 16.000                      | 15.060           | T   |
| 7. | Jumlah terminal dalam kondisi baik                              | 12                          | 12               | Y   |
| 8. | Jumlah alat uji yang berfungsi                                  | 12                          | 12               | Y   |

Keterangan :

T = Belum Mencapai Target Renstra

Y = Sudah Mencapai Target Renstra

## B. Realisasi Anggaran

### 1. Realisasi Belanja Tahun 2022

Pada tahun 2022 Dinas Perhubungan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 58.307.301.416 dengan komposisi anggaran untuk belanja operasi sebesar Rp. 32.705.630.366 dan belanja modal sebesar Rp. 25.601.671.050, dengan proporsi sesuai ilustrasi pada *pie chart* berikut :

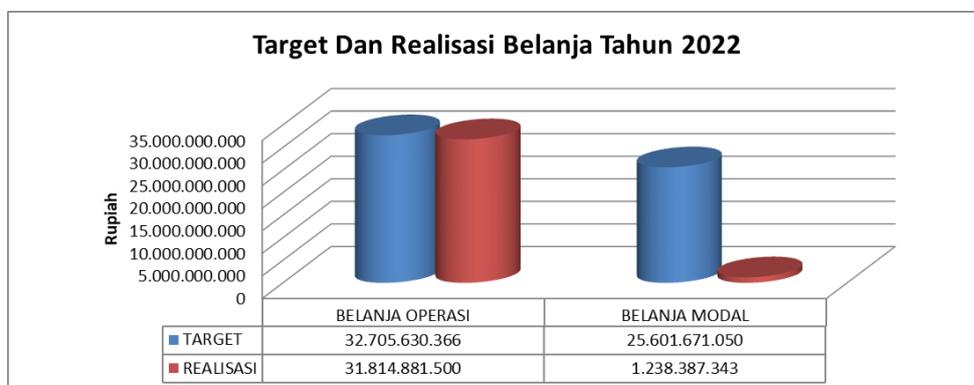
Gambar 3.14

Komposisi Alokasi Anggaran Tahun 2022



Capaian belanja langsung maupun tidak langsung dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Gambar 3.15  
Target Dan Realisasi Belanja Tahun 2022



Dari grafik tersebut dapat dianalisis capaian belanja operasi sebesar 97,28% dan belanja modal sebesar 4,84%. Dari total belanja langsung sebesar Rp. 58.307.301.416 terdapat anggaran yang dibiayai oleh bantuan keuangan provinsi Jawa Barat sebesar Rp.24.986.027.400 untuk Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, sub kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota sehingga komposisi belanja langsung berdasarkan sumber dana tersebut diidentifikasi seperti pada *pie chart* sebagai berikut :

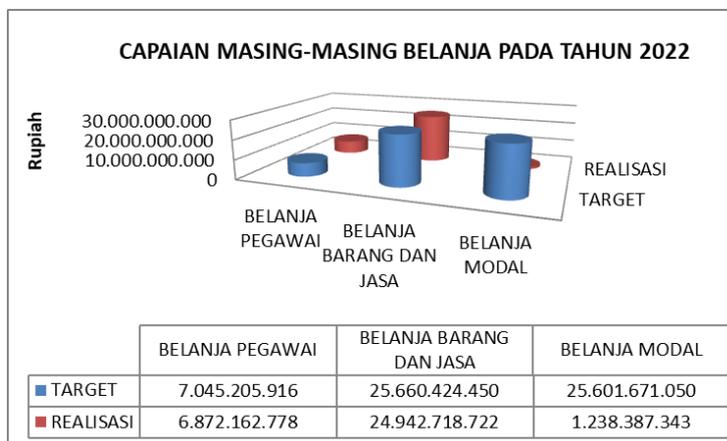
Gambar 3.16  
Komposisi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Sumber Dana



Sedangkan untuk komposisi belanja langsung baik target dan realisasinya yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan

dibagi atas 3 komponen belanja dengan rincian pada grafik sebagai berikut :

Gambar 3.17  
Capaian Komponen Belanja

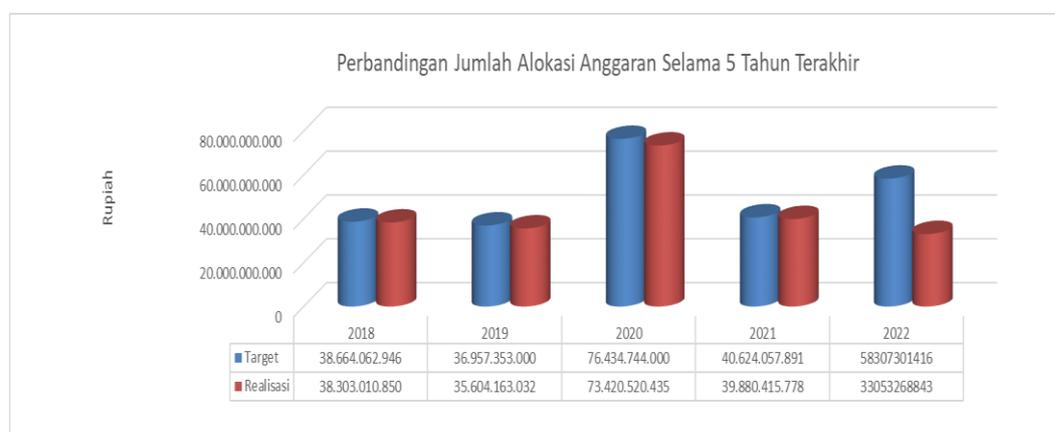


Dari ilustrasi grafik tersebut di atas dapat dianalisis bahwa capaian penggunaan anggaran pada Dinas Perhubungan Tahun 2022 yaitu untuk belanja pegawai dicapai sebesar 97,54%, belanja barang dan jasa sebesar 97,20% serta untuk belanja modal capaiannya adalah sebesar 4,84%.

## 2. Perkembangan Alokasi Anggaran Selama 5 Tahun

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun perkembangan alokasi anggaran yang dikelola oleh Dinas Perhubungan dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

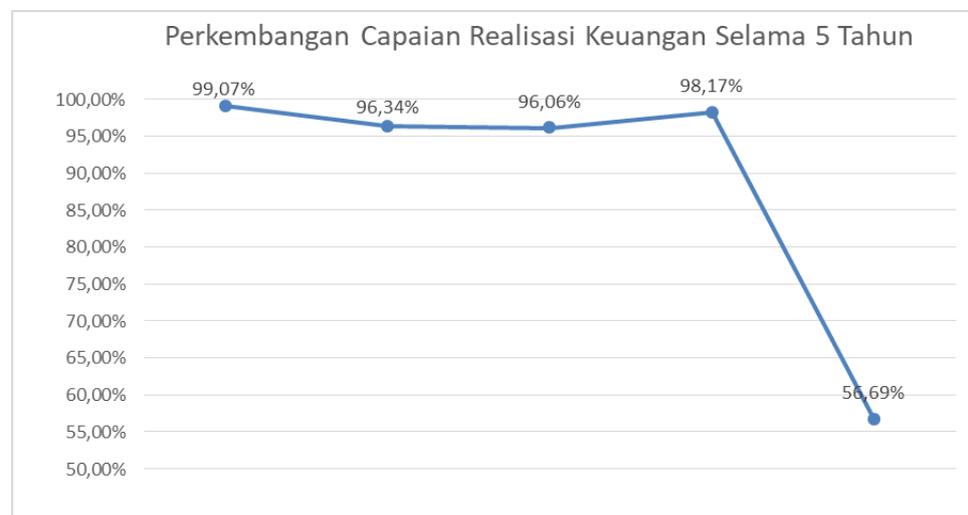
Gambar 3.18  
Perbandingan Jumlah Alokasi Anggaran Selama 5 Tahun Terakhir



Dari grafik tersebut bahwa pada tahun 2022 secara keseluruhan total alokasi anggaran yang dikelola Dinas Perhubungan meningkat dikarenakan kegiatan yang dilaksanakan sesuai skala prioritas dari Dinas dan kemampuan anggaran untuk urusan perhubungan. Realisasi capaiannya untuk tahun 2022 baik belanja operasi maupun belanja modal yaitu 56,69%.

Perkembangan capaian pengelolaan anggaran selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Gambar 3.19  
Perkembangan Capaian Realisasi Keuangan Selama 5 Tahun



Dari grafik tersebut di atas dapat dianalisis pada tahun 2022 serapan anggaran lebih rendah dari tahun 2021 karena adanya keterlambatan pembayaran pada kegiatan bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp.24.986.027.400 yang rencananya akan dibayarkan pada anggaran Tahun Anggaran 2023 (carry over ke tahun anggaran 2023).

### 3. Realisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Dinas Perhubungan selain melaksanakan tupoksi juga mengelola pendapatan asli daerah, dibawah ini adalah jenis pungutan retribusi yang dikelola oleh Dinas Perhubungan sebagai berikut :

Tabel 3.10  
Realisasi Capaian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022

| No            | Jenis Pungutan                                       | Target               | Realisasi            | %              |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 1             | <b>Retribusi Jasa Umum</b>                           | <b>2.345.770.000</b> | <b>2.223.490.700</b> | <b>102,02%</b> |
| a.            | Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum                     | 725.770.000          | 740.459.000          | 91,55%         |
| b.            | Pengujian Kendaraan Bermotor                         | 1.620.000.000        | 1.483.031.700        | 101,27%        |
| 2             | <b>Retribusi Jasa Usaha</b>                          | <b>11.850.000</b>    | <b>12.000.000</b>    | <b>235,99%</b> |
| a.            | Pemakaian Kekayaan Daerah                            | 5.085.000            | 12.000.000           | 72,85%         |
| 3             | <b>Retribusi Jasa Usaha Terminal</b>                 | <b>431.820.000</b>   | <b>314.601.300</b>   | <b>71,82%</b>  |
| a.            | Jasa Usaha Terminal                                  | 370.120.000          | 265.805.300          | 64,04%         |
|               | Terminal Ciamis                                      | 165.370.000          | 105.910.000          | 54,95%         |
|               | Terminal Sindangkasih                                | 15.357.000           | 8.438.700            | 60,20%         |
|               | Terminal Pamokolan                                   | 15.950.000           | 9.602.000            | 75,28%         |
|               | Terminal Cisaga                                      | 8.124.000            | 6.115.500            | 100,09%        |
|               | Terminal Banjarsari                                  | 36.427.000           | 36.60.000            | 44,05%         |
|               | Terminal Pamarican                                   | 6.000.000            | 2.643.000            | 47,69%         |
|               | Terminal Cimaragas                                   | 7.500.000            | 3.576.500            | 89,65%         |
|               | Terminal Kawali                                      | 52.460.000           | 47.031.000           | 77,10%         |
|               | Terminal Rancah                                      | 10.250.000           | 7.903.000            | 71,15%         |
|               | Terminal Panjalu                                     | 30.000.000           | 21.345.000           | 80,72%         |
|               | Terminal Cibeureum                                   | 4.107.000            | 3.315.000            | 72,49%         |
|               | Terminal Panumbangan                                 | 18.575.000           | 13.465.600           | 285,11%        |
| b.            | Fasilitas Umum                                       | 10.680.000           | 30.450.000           | 35,96%         |
| c.            | Tempat Khusus Parkir                                 | 51.020.000           | 18.346.000           | 114,08%        |
| 4             | <b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>                  | <b>74.046.000</b>    | <b>84.469.000</b>    | <b>105,50%</b> |
| a.            | Izin Trayek  | 24.070.000           | 25.394.000           | 118,21%        |
| b.            | Penggunaan Jalan Bongkar Muat                        | 49.976.000           | 59.075.000           | 102,02%        |
| 5             | <b>Lain-Lain PAD Yang Sah</b>                        | <b>-</b>             | <b>3.000.000</b>     | <b>-</b>       |
| a.            | Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | -                    | 3.000.000            | -              |
| <b>JUMLAH</b> |  | <b>2.856.721.000</b> | <b>2.637.561.600</b> | <b>92,33%</b>  |

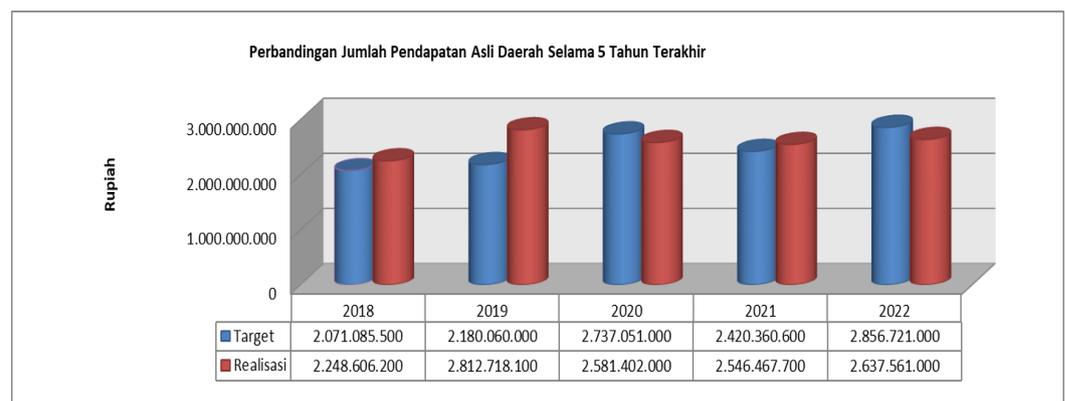
Dari tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan capaian realisasi pendapatan asli daerah yang dikelola oleh Dinas Perhubungan tidak mencapai target yang ditetapkan, dengan capaian rata-rata yaitu sebesar 92,33%. Adapun realisasi capaian

PAD pada tahun 2022 yang sangat tinggi terdapat pada capaian penerimaan retribusi pengujian kendaraan bermotor, hal ini karena dipengaruhi oleh kendaraan yang diuji pada unit pelayanan PKB di Ciamis tidak hanya kendaraan wajib uji domisili Kabupaten Ciamis saja melainkan dari kabupaten kota lainnya yang melaksanakan numpang uji serta potensi kendaraan wajib uji Kabupaten Pangandaran yang melaksanakan uji berkala di unit pelayanan PKB Kabupaten Ciamis sesuai Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis Dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran Nomor : 551.21/1876/Dishub.02/2018 dan Nomor : 551.21/670/DISHUB/2018 Tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Pangandaran Di Kabupaten Ciamis.

#### 4. Perkembangan Capaian PAD Selama 5 Tahun

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun dibawah ini dapat dilihat target dan realisasi pengelolaan pendapatan asli daerah di sektor perhubungan.

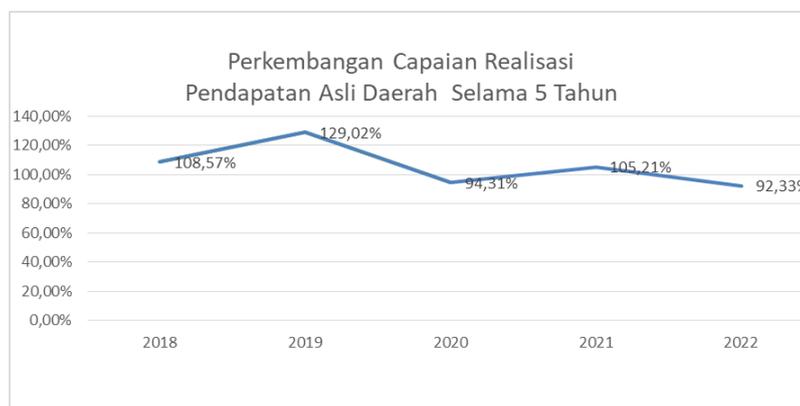
Gambar 3.20  
Jumlah Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah



Dari grafik tersebut diatas dibawah ini adalah perkembangan capaian realisasi pendapatan asli daerah selama 5 tahun :

Gambar 3.21

Data Perkembangan Capaian Realisasi PAD



Dari grafik tersebut dapat diilustrasikan bahwa tahun 2022 capaiannya mengalami penurunan, hal ini disebabkan adanya Peraturan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Nomor KP.4413.AJ.307/DRJD/2020 Tentang Kebijakan normalisasi kendaraan, sehingga sebagian Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) dilakukan penolakan pengujian terhadap kendaraan yang over dimensi, selain itu disebabkan karena masih adanya dampak pandemi *Covid-19*.

### C. Analisis atas Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran

Rencana pembiayaan dalam pencapaian 5 (lima) sasaran strategis dengan 9 (sembilan) indikator sasaran dan 11 (sebelas) kegiatan tahun 2022 sebesar Rp. 58.307.301.416 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 33.053.268.843 atau capaian sekitar 56,69% sedangkan untuk capaian sasaran terhadap perjanjian kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 96,80% adalah masuk kategori efisien, adapun rincian kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut.

Tabel 3.11  
Efisiensi Rasio Fisik Dan Keuangan  
Dari Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis

| No | Kegiatan / Sub Kegiatan   | Realisasi Fisik (%) | Realisasi Keuangan (%) | Keterangan |
|----|---|---------------------|------------------------|------------|
| 1  | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota  | 100,00              | 99,53                  |            |
|    | Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas                      | 100,00              | 99,19                  | Efisien    |
|    | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota  | 100,00              | 100,00                 | Efisien    |
|    | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota   | 100,00              | 100,00                 | Efisien    |
| 2  | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota   | 100,00              | 12,36                  |            |
|    | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota   | 100,00              | 9,40                   | Efisien    |
|    | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan  | 100,00              | 97,77                  | Efisien    |
| 3  | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                        | 100,00              | 98,88                  |            |
|    | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                        | 100,00              | 100,00                 | Efisien    |
|    | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | 100,00              | 100,00                 | Efisien    |
| 4  | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C   | 100,00              | 99,86                  |            |
|    | Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Tipe C  | 100,00              | 99,91                  | Efisien    |
| 5  | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  | 100,00              | 98,98                  |            |
|    | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  | 100,00              | 92,17                  | Efisien    |
|    | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor   | 100,00              | 100,00                 | Efisien    |
|    | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  | 100,00              | 98,67                  | Efisien    |

|    |  |        |        |         |
|----|--|--------|--------|---------|
|    | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  | 100,00 | 100,00 | Efisien |
| 6  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 100,00 | 100,00 |         |
|    | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 100,00 | 100,00 | Efisien |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 100,00 | 100,00 | Efisien |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 100,00 | 100,00 | Efisien |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                            | 100,00 | 100,00 | Efisien |
| 7  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 100,00 | 97,54  |         |
|    | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | 100,00 | 97,54  | Efisien |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  | 100,00 | 100,00 | Efisien |
|    | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                                    | 100,00 | 100,00 | Efisien |
| 8  | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 100,00 | 99,16  |         |
|    | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | 100,00 | 100,00 | Efisien |
|    | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 100,00 | 100,00 | Efisien |
|    | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   | 100,00 | 100,00 | Efisien |
|    | Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan  | 100,00 | 98,75  | Efisien |
|    | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | 100,00 | 97,10  | Efisien |
|    | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 100,00 | 100,00 | Efisien |
| 9  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 100,00 | 99,10  |         |
|    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | 100,00 | 100,00 | Efisien |
|    | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                     | 100,00 | 98,87  | Efisien |
| 10 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 100,00 | 99,97  |         |
|    | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik   | 100,00 | 99,98  | Efisien |
|    | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 100,00 | 99,39  | Efisien |
| 11 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 100,00 | 99,83  |         |
|    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 100,00 | 100,00 | Efisien |

|    |   |        |        |         |
|----|---|--------|--------|---------|
|    | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | 100,00 | 99,76  | Efisien |
| 12 | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan  |        |        |         |
|    | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | 100,00 | 99,95  | Efisien |
| 13 | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota  |        |        |         |
|    | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin  | 100,00 | 100,00 | Efisien |
| 14 | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir  |        |        |         |
|    | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota      | 100,00 | 100,00 | Efisien |

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2022 mampu mewujudkan pencapaian terhadap penetapan sasaran strategis.

# ***BAB IV***

## ***PENUTUP***

### **A. Kesimpulan**

Dari laporan kinerja yang telah dianalisis dan ditarik kesimpulan bahwa sebagian besar capaian sasaran strategis yang telah di laksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan rata-rata sudah mencapai 100,00% bahkan ada beberapa yang melebihi dari target yang telah ditetapkan baik terhadap indikator kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2022 maupun terhadap indikator kinerja utama (IKU), peningkatan tersebut dipengaruhi dari beberapa faktor dukungan bantuan teknis dari Provinsi Jawa Barat terkait pengadaan perlengkapan jalan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis. Adapun ada beberapa indikator kinerja yang tidak tercapai, hal ini disebabkan masih adanya dampak pandemi *Covid-19* yang terjadi pada awal tahun 2020, sehingga masih berdampak terhadap anggaran dan kondisi lingkungan di kabupaten Ciamis sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian target indikator kinerja Dinas Perhubungan memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen baik dari aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan di bidang perhubungan.

### **B. Saran**

Dalam perencanaan pembangunan pasti akan ada suatu permasalahan yang berkembang dan merupakan tantangan bagi Dinas Perhubungan dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang dengan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perhubungan, melalui:
  - a. Peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya aparatur perhubungan.

- b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan peningkatan pelayanan dibidang perhubungan.
2. Inovasi untuk pelaksanaan program kerja dan anggaran yang lebih efektif melalui perubahan mekanisme penyusunan program kerja/anggaran menjadi "*bottom up*" sesuai kebutuhan organisasi.
3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat.
4. Optimalisasi mekanisme untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
5. Peningkatan koordinasi/kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan melibatkan berbagai sektor.

# **LAMPIRAN I**

**SK INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2019-2024**



# PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2019-2024



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS**  
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIAMIS**  
Jl. Otto Iskandardinata, Lingkar Selatan-Benteng, Ciamis  
Telepon/Fax : (0265) 7578862  
Email : [dishubciamis2017@gmail.com](mailto:dishubciamis2017@gmail.com)

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kekhadirat Allah SWT, karena hanya atas perkenan dan ridhoNya penyusunan Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2024 ini dapat diselesaikan.

Perubahan Indikator Kinerja Utama ini diharapkan menjadi salah satu media untuk dapat mengukur dan mengevaluasi sampai sejauh mana program kerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sehingga menjadi bahan pertimbangan untuk peningkatan kinerja dan pencapaian sasaran ditahun yang akan datang.

Kami sadari bahwa Perubahan IKU ini masih belum sempurna baik dari segi materi maupun cara penyusunannya, untuk itu saran dan masukan yang bersifat konstruktif akan sangat kami hargai.

Semoga dokumen Perubahan IKU ini dapat bermanfaat.

Ciamis, 21 Maret 2022

Pit. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN CIAMIS



Drs. ACHMAD YANI, MM  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19751118 199412 1 001

# ***DAFTAR ISI***

|                 |   |     |
|-----------------|---|-----|
| KATA PENGANTAR  |   | i   |
| DAFTAR ISI      |   | ii  |
| DAFTAR LAMPIRAN |   | iii |
| <br>            |   |     |
| BAB I           | PENDAHULUAN                                 | 1   |
|                 | 1.1 LATAR BELAKANG.....                     | 1   |
|                 | 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN .....                 | 2   |
|                 | 1.3 LANDASAN HUKUM .....                    | 2   |
| <br>            |   |     |
| BAB II          | PERENCANAAN KINERJA                         | 4   |
|                 | 2.1 DEFINISI INDIKATOR KINERJA UTAMA.....   | 4   |
|                 | 2.2 SYARAT KRITERIA INDIKATOR KINERJA UTAMA | 4   |
| <br>            |   |     |
| BAB III         | GAMBARAN UMUM                               | 6   |
|                 | 3.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....             | 6   |
|                 | 3.2 TUJUAN.....                             | 6   |
|                 | 3.3 SASARAN.....                            | 7   |
|                 | 3.4 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....        | 7   |
| <br>            |   |     |
| BAB IV          | PENUTUP                                     | 9   |
| <br>            |   |     |
| LAMPIRAN        |   |     |

# **DAFTAR LAMPIRAN**

## **LAMPIRAN I**

**Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2024**

## **LAMPIRAN II**

**Target Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2024**

# ***BAB I***

## ***PENDAHULUAN***

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan seoptimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Dalam mewujudkan tujuan kesejahteraan tersebut setiap lembaga maupun instansi pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan dimulai dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan yang profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam indikator kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran indikator kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan target pada perencanaan yang tertuang RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, pemilihan dan penetapan perubahan indikator kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan di lingkungan lembaga/ instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan perubahan Indikator Kinerja Utama.

## 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Penetapan Perubahan indikator kinerja utama Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

## 1.3 LANDASAN HUKUM

Yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Perubahan indikator utama pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis adalah :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Klasifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
9. Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;
11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Perhubungan.
13. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 38 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;

## **BAB II**

### **PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA**

#### **2.1 DEFINISI PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Perubahan Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

#### **2.2 SYARAT KRITERIA PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Penetapan Perubahan indikator utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria indikator kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) yaitu :

1. Spesifik, indikator kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.
2. Measurable, indikator kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. Acvievable, indikator kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.
4. Relevant, indikator kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang diukur.

5. Timelines, indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin indikator kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam penetapan dan pemilihan perubahan indikator kinerja utama hendaknya mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan emngacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan akuntabilitas kinerja.
4. Kebutuhan statistic pemerintah.
5. Perkembangan isu dan ilmu pengetahuan.

## ***BAB III***

### ***GAMBARAN UMUM***

#### **3.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijaksanaan penyelenggaraan urusan perhubungan yang meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan perhubungan yang meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **3.2 TUJUAN**

Yang menjadi tujuan dari dibentuknya Dinas Perhubungan yaitu :

1. Meningkatkan fasilitas keselamatan lalu lintas;
2. Meningkatkan pelayanan dibidang perhubungan.

### 3.3 SASARAN

Sedangkan yang menjadi sasaran dari tujuan tersebut yaitu :

| No | Tujuan  | Indikator Tujuan                     | Sasaran  | Indikator Sasaran   |
|----|---|--------------------------------------|--|---|
| 1  | Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur secara merata   | Indeks keselamatan lalu lintas       | Meningkatnya sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan angkutan darat yang berfungsi dengan baik  | Persentase sarana/prasarana lalu lintas yang layak fungsi |
|    |   |                                      |  | Persentase layanan angkutan darat yang layak fungsi       |
| 2  | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)     | Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Perhubungan        |
|    |   | Hasil Evaluasi AKIP                  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah     | Hasil LHE AKIP Dinas Perhubungan                          |
|    |   | Maturitas SPIP                       | Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah | Level Maturitas SPIP Dinas Perhubungan                    |
|    |   | Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah  | Kualitas Laporan Keuangan Dinas Perhubungan               |

### 3.4 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sedangkan yang menjadi strategi dan arah kebijakan dalam pencapaian sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan; dengan arah kebijakan pembangunan yaitu peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat.
2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ; dengan arah kebijakan rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor.
3. Peningkatan Pelayanan Angkutan; dengan arah kebijakan pemantauan dan pembinaan perizinan angkutan penumpang umum.
4. Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas; dengan arah kebijakan pengadaan rambu-rambu lalu lintas.
5. Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor; dengan arah kebijakan pengawasan operasional pengujian kendaraan bermotor.
6. Peningkatan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum; dengan arah kebijakan pengadaan penerangan jalan umum.

## ***BAB IV***

### ***PENUTUP***

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD dan Perubahan Renstra masing-masing unit kerja.

Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam Perubahan RPJMD dan Perubahan RENSTRA Dinas Perhubungan.

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN CIAMIS



Drs. ACHMAD YANI, MM  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19751118 199412 1 001



# LAMPIRAN - LAMPIRAN

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024**

| TUJUAN  | INDIKATOR                      | FORMULA  | SASARAN   | INDIKATOR   | FORMULA  | PENJELASAN   | BIDANG PENANGGUNGJAWAB  |
|---|--------------------------------|--|---|---|--|--|---|
| Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur secara merata   | Indeks keselamatan lalu lintas | ( Persentase sarana/prasarana lalu lintas yang layak fungsi + Persentase layanan angkutan darat yang layak fungsi) / 2 | Meningkatnya sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan angkutan darat yang berfungsi dengan baik | Persentase sarana/prasarana lalu lintas yang layak fungsi | ((Jumlah sarana prasarana yang tersedia - jumlah sarana prasarana yang tidak berfungsi)/jumlah sarana prasarana yang tersedia)*100                   | Hasil penghitungan % sarana/prasarana lalu lintas yang layak fungsi              | Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Seksi Teknik Sarana,                            |
|   |                                |  |   | Persentase layanan angkutan darat yang layak fungsi       | ((Jumlah Layanan angkutan darat yang berfungsi-jumlah layanan angkutan darat yang tidak berfungsi)/jumlah Layanan angkutan darat yang berfungsi)*100 | Hasil penghitungan % layanan angkutan darat yang layak fungsi                    | Seksi Bina Usaha Angkutan, Seksi Jaringan Transportasi, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor |
| Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas | Hasil Penilaian SAKIP          | Hasil penilaian semua dokumen SAKIP  | Meningkat-nya akuntabilitas kinerja dan kapasitas organisasi perangkat daerah                           | Level Maturitas SPIP                                      | Kelengkapan dokumen dan data dukung SPIP   | Penilaian oleh inspektorat terhadap penerapan SPIP di Dinas Perhubungan          | Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan   |
|   |                                |  |   | Hasil LHE AKIP  | Kelengkapan data pada LKIP   | Penilaian oleh inspektorat terhadap penerapan evaluasi AKIP di Dinas Perhubungan | Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan   |
|   |                                |  |   | Kualitas Laporan Keuangan                                 | Kelengkapan Neraca, LRA dan CALK   | Penilaian oleh inspektorat terhadap Laporan Keuangan di Dinas Perhubungan        | Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan   |

| TUJUAN | INDIKATOR | FORMULA | SASARAN  | INDIKATOR                        | FORMULA   | PENJELASAN  | BIDANG PENANGGUNGJAWAB              |
|--------|-----------|---------|--|----------------------------------|---|---|-------------------------------------|
|        |           |         | Meningkat-nya kinerja organisasi perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Hasil isian dari responden dari questioner terhadap pelayanan perhubungan | Penilaian dilakukan di Dinas Perhubungan dan dianalisis oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Ciamis | Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan |

Plt.KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN CIAMIS



Dis. AGHMAD YANI, MM  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19751118 199412 1 001

**TARGET PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024**

| NO | TUJUAN  | INDIKATOR TUJUAN                        | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                   | SATUAN   | REALISASI 2019 | TARGET |        |        |        |        |
|----|---|---|--|---|----------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |   |   |  |   |          |                | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   |
| 1. | Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur secara merata   | Indeks keselamatan lalu lintas          |  |   | %        | 89,135         | 93,716 | 93,75  | 95,163 | 96,393 | 96,736 |
|    |   |   | Meningkatnya sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan angkutan darat yang berfungsi dengan baik  | Persentase sarana/prasarana lalu lintas yang layak fungsi | %        | 84,222         | 92,195 | 92,262 | 93,714 | 95,075 | 95,762 |
|    |   |   |  | Persentase layanan angkutan darat yang layak fungsi       | %        | 94,048         | 95,238 | 95,238 | 96,612 | 97,711 | 97,711 |
| 2. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah |  |   | Mutu     | Baik           | Baik   | Baik   | Baik   | Baik   | Baik   |
|    |   |   | Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah  | Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Dinas Perhubungan        | Point    | 86             | 85,30  | 85,35  | 85,40  | 85,45  | 85,50  |
|    |   | Hasil Evaluasi AKIP Daerah              |  |   | Predikat | B              | BB     | BB     | BB     | BB     | BB     |
|    |   |   | Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah | Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan                     | Point    | 71,72          | 71,75  | 71,80  | 71,85  | 71,90  | 71,95  |
|    |   | Maturitas SPIP Daerah                   |  |   | Level    | 2              | 3      | 3      | 3      | 3      | 3      |

|  |                             |  |  |          |     |     |     |     |     |     |
|--|-----------------------------|--|--|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |                             | Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah | Hasil Level Maturitas SPIP Dinas Perhubungan           | Point    | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   | 3   |
|  | Kualitas Pelaporan Keuangan |  |  | Predikat | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
|  |                             | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah  | Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan Dinas Perhubungan | Point    | 672 | 700 | 725 | 750 | 775 | 800 |

Pt.KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN CIAMIS



Drs. ACHMAD YANI, MM   
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19751118 199412 1 001

# **LAMPIRAN II**

**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2022**



# PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON II TAHUN 2022 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIAMIS



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS  
DINAS PERHUBUNGAN**

**JL. Otto Iskandardinata, Lingkar Selatan-Benteng Ciamis Telp/Fax (0265) 7578862  
Email : [dishubciamis2017@gmail.com](mailto:dishubciamis2017@gmail.com)**



## PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Drs. ACHMAD YANI., MM  
Jabatan : Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. HERDIAT SUNARYA  
Jabatan : BUPATI CIAMIS

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. H. HERDIAT SUNARYA

Ciamis, 15 November 2022

Pihak Pertama,

Drs. ACHMAD YANI., MM

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIAMIS**

| No. | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA  | TARGET               |
|-----|--|--|----------------------|
| [1] | [2]  | [3]  | [4]                  |
| 1   | Meningkatnya sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan angkutan darat yang berfungsi dengan baik  | 1 Persentase sarana/prasarana lalu lintas yang layak fungsi<br>2 Persentase layanan angkutan darat yang layak fungsi | 93,714 %<br>96,612 % |
| 2   | Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah  | 1 Indeks kepuasan masyarakat (IKM) Dinas Perhubungan   | 85,40 point          |
| 3   | Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah     | 1 Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan  | 71,85 point          |
| 4   | Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah | 1 Hasil Level Maturitas SPIP Dinas Perhubungan   | 3,00 point           |
| 5   | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah  | 1 Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan Dinas Perhubungan   | 750,00 point         |

**Program**

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

**Jumlah**

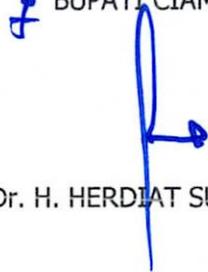
**Anggaran (Rp.)**

26.475.723.566

31.831.577.850

**58.307.301.416**

BUPATI CIAMIS



Dr. H. HERDIAT SUNARYA

Ciamis, 15 November 2022  
Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN CIAMIS



Drs. ACHMAD YANI., MM

# **LAMPIRAN III**

**PENGUKURAN**

**PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA**

**TAHUN 2022**

**PENGUKURAN PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIAMIS**

| NO | SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA   | TARGET | REALISASI | %      | KET  |  |
|----|--|---|--------|-----------|--------|------|--|
| 1  | 2  | 3   | 4      | 5         | 6      | 7    |  |
| 1. | Meningkatnya sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas dan angkutan darat yang berfungsi dengan baik  | Persentase sarana/prasarana lalu lintas yang layak fungsi | 54,20  | %         | 53,38  | %    | 98,49 %<br>Hasil penghitungan traffic light, warning light, rambu, pagar pengaman, penerangan jalan umum yang layak fungsi |
|    |  | Persentase layanan angkutan darat yang layak fungsi       | 67,37  | %         | 60,57  | %    | 89,91 %<br>Hasil penghitungan terminal, halte, alat uji, izin trayek, uji kir yang layak fungsi                            |
| 2. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Perhubungan        | 85,40  | %         | 80,59  | %    | 94,37 %<br>Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 2022   |
| 3  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada perangkat daerah     | Hasil LHE AKIP Dinas Perhubungan                          | 71,85  | poin      | 67,56  | poin | 94,03 %<br>Hasil evaluasi AKIP menggunakan data capaian terakhir 2022  |
| 4  | Meningkatnya penyelenggaraan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah | Level Maturitas SPIP Dinas Perhubungan                    | 3      | poin      | 3,00   | poin | 100,00 %<br>Hasil level maturitas SPIP menggunakan data capaian terakhir 2022  |
| 5  | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Perangkat daerah  | Kualitas Laporan Keuangan Dinas Perhubungan               | 750    | poin      | 754,56 | poin | 100,61 %<br>Hasil Pelaporan Keuangan menggunakan data capaian terakhir 2022  |

Ciamis, Februari 2023

PIKUPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN CIAMIS



Ds. ACHMAD YANI, MM  
NIP. 19751118 199412 1 001

# **LAMPIRAN IV**

## **PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN**

### **TAHUN 2022**

| DINAS PERHUBUNGAN         |                          |  |                                     |        |           |        |              |                              |                                |
|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|--------|-----------|--------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| URUSAN PEMERINTAHAN       | OPD PELAKSANA            | KEBIJAKAN  | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN | TARGET | REALISASI | SATUAN | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
| <b>BIDANG PERHUBUNGAN</b> | <b>DINAS PERHUBUNGAN</b> | 1. Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Parkir Berlangganan di Tepi Jalan Umum berdasarkan Perbup No 55 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Parkir Berlangganan Di Tepi Jalan Umum dengan tujuan, sebagai acuan dan petunjuk teknis di lapangan yang mencakup aturan pelaksanaan pemungutan penyetoran retribusi parkir berlangganan, aturan rekrutmen juru parkir. Aturan kerjasama dengan pihak ketiga dan petunjuk teknis lainnya berkaitan dengan parkir berlangganan. |                                     |        |           |        |              |                              |                                |
|                           |                          | 2. Tarif Angkutan Penumpang Umum Lokal berdasarkan Perbup No. 77 Tahun 2022 tentang Tarif Definitif Angkutan Penumpang Umum Lokal Di Kabupaten Ciamis dengan tujuan Sebagai Acuan Terhadap Besaran Tarif Angkutan Umum Di Kab Ciamis, Untuk Memberikan Kepastian Terhadap Tarif Yang Berlaku Untuk Angkutan Umum di Kabupaten Ciamis , Meredam Gejolak Awal Angkutan Umum Kaitan Dengan Naiknya Harga BBM dan Mengakomodir Kenaikan Tarif Semena Mena Di Lapangan.                 |                                     |        |           |        |              |                              |                                |
|                           |                          | 3. Penetapan penerima dan besaran insentif pemungutan retribusi daerah pada Dinas Perhubungan Kab. Ciamis berdasarkan Keputusan Bupati No. 900/Kpts.70-Huk/2022 tentang Penetapan Penerima Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis dengan tujuan Menetapkan penerima insentif dan besaran pembagian insentif pemungutan retribusi daerah   |                                     |        |           |        |              |                              |                                |

| URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN                                  | TARGET                | REALISASI            | SATUAN    | PERMASALAHAN  | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN   | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|---------------------|---------------|-----------|--|-----------------------|----------------------|-----------|---|--|--------------------------------|
|                     |               |           | <b>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)</b> | <b>31,831,577,850</b> | <b>6,761,646,211</b> | <b>Rp</b> |   |  |                                |
|                     |               |           | Indikator Program :  |                       |                      |           |   |  |                                |
|                     |               |           | 1. Persentase Pemenuhan Perlengkapan Jalan                           | 54,20                 | 53,38                | %         |   |  |                                |
|                     |               |           | 2. Persentase Layanan Angkutan Darat                                 | 67,37                 | 60,57                | %         |   |  |                                |
|                     |               |           |  |                       |                      |           | Untuk pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) segera menyusun rencana induk penerangan jalan umum untuk perencanaan teknis pembangunan PJU selama 5 tahun, mengusulkan kegiatan pemeliharaan penerangan jalan umum. Dan mengusulkan kegiatan pengadaan penerangan jalan umum, untuk mengurangi beban anggaran dalam pembayaran pajak penerangan jalan umum seluruh PJU agar di nasani meterisasi. | 1. Akan melaksanakan kegiatan penyusunan rencana induk PJU di tahun 2023<br>2. Akan melakukan pemeliharaan PJU (kegiatan rutin)<br>3. Akan melakukan kegiatan migrasi (kegiatan rutin) |                                |
|                     |               |           |  |                       |                      |           | Belum optimalnya kegiatan pengadaan fasilitas perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan, pagar pengaman jalan, Traffic Light dan Warning Light.  | Melaksanakan perencanaan dan pengadaan fasilitas perlengkapan jalan berupa rambu lalu lintas, marka jalan, pagar pengaman jalan, Traffic Light dan Warning Light                       |                                |
|                     |               |           |  |                       |                      |           | Kurangnya SDM tenaga penguji melalui usulan formasi CPNS pada jabatan fungsional penguji kendaraan bermotor.  | Mengusulkan Penguji Tingkat II = 2 orang Penguji Tingkat III = 2 orang   |                                |
|                     |               |           |  |                       |                      |           | Belum terealisasinya pengadaan unit pengujian kendaraan uji keliling beserta peralatan pengujianya, untuk meningkatkan pelayanan pengujian ke daerah-daerah terpencil (jemput bola)   | Mengusulkan 1 unit kendaraan pengujian beserta perlengkapannya   |                                |
|                     |               |           |  |                       |                      |           | Dalam upaya peningkatan PAD di bidang pajak kendaraan perlu dilakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat untuk memutasi kendaraan yang belum menggunakan plat nomor kendaraan wilayah Ciamis dan tentang pajak parkir berlangganan.   | Akan Melakukan kegiatan sosialisasi mengenai plat nomor kendaraan wilayah Ciamis dan parkir berlangganan melalui media cetak dan media masa.   |                                |

| URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN  | TARGET                | REALISASI            | SATUAN    | PERMASALAHAN   | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN                | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|---------------------|---------------|-----------|--|-----------------------|----------------------|-----------|--|---|--------------------------------|
|                     |               |           |  |                       |                      |           | Belum adanya dukungan sarana generator sebagai pendukung kegiatan dan pekerjaan di UPTD uji kelayakan kendaraan. | Mengusulkan seperangkat koneksi ke alat uji |                                |
|                     |               |           | <b>Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota</b>  | <b>28,596,576,850</b> | <b>3,539,285,645</b> | <b>Rp</b> |  |   |                                |
|                     |               |           | Indikator Kegiatan :   |                       |                      |           |  |   |                                |
|                     |               |           | 1. Persentase Ruas Jalan yang memiliki Perlengkapan Jalan dalam kondisi baik   | 100                   | 53                   | %         |  |   |                                |
|                     |               |           | <b>Sub kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>  | <b>27,634,481,700</b> | <b>2,598,617,595</b> | <b>Rp</b> |  |   |                                |
|                     |               |           | Indikator Sub Kegiatan :   |                       |                      |           |  |   |                                |
|                     |               |           | 1. Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia   | 405                   | 409                  | Unit      |  |   |                                |
|                     |               |           | <b>Sub kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan</b>   | <b>962,095,150</b>    | <b>940,668,050</b>   | <b>Rp</b> |  |   |                                |
|                     |               |           | Indikator Sub Kegiatan :   |                       |                      |           |  |   |                                |
|                     |               |           | 1. Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara   | 500                   | 718                  | Unit      |  |   |                                |
|                     |               |           | <b>Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>  | <b>140,480,000</b>    | <b>140,349,900</b>   | <b>Rp</b> |  |   |                                |
|                     |               |           | Indikator Kegiatan :   |                       |                      |           |  |   |                                |
|                     |               |           | 1. Persentase Terminal Dalam Kondisi Baik  | 100                   | 100                  | %         |  |   |                                |
|                     |               |           | <b>Sub kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C</b>   | <b>140,480,000</b>    | <b>140,349,900</b>   | <b>Rp</b> |  |   |                                |
|                     |               |           | Indikator Sub Kegiatan :   |                       |                      |           |  |   |                                |
|                     |               |           | 1. Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun  | 1                     | 1                    | Dokumen   |  |   |                                |
|                     |               |           | <b>Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>   | <b>758,872,500</b>    | <b>758,872,500</b>   | <b>Rp</b> |  |   |                                |
|                     |               |           | Indikator Kegiatan :   |                       |                      |           |  |   |                                |
|                     |               |           | 1. Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir   | 100                   | 100                  | %         |  |   |                                |
|                     |               |           | <b>Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota</b> | <b>758,872,500</b>    | <b>758,872,500</b>   | <b>Rp</b> |  |   |                                |
|                     |               |           | Indikator Sub Kegiatan :   |                       |                      |           |  |   |                                |
|                     |               |           | 1. Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota  | 12                    | 12                   | Laporan   |  |   |                                |
|                     |               |           | <b>Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>   | <b>713,525,400</b>    | <b>706,259,370</b>   | <b>Rp</b> |  |   |                                |
|                     |               |           | Indikator Kegiatan :   |                       |                      |           |  |   |                                |
|                     |               |           | 1. Persentase Kendaraan Bermotor yang Lulus Uji  | 100                   | 100                  | %         |  |   |                                |
|                     |               |           | <b>Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>   | <b>35,900,000</b>     | <b>33,088,000</b>    | <b>Rp</b> |  |   |                                |
|                     |               |           | Indikator Sub Kegiatan :   |                       |                      |           |  |   |                                |
|                     |               |           | 1. Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya  | 2                     | 2                    | orang     |  |   |                                |
|                     |               |           | <b>Sub kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>  | <b>52,500,000</b>     | <b>52,500,000</b>    | <b>Rp</b> |  |   |                                |
|                     |               |           | Indikator Sub Kegiatan :   |                       |                      |           |  |   |                                |

| URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN   | TARGET               | REALISASI            | SATUAN    | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|---------------------|---------------|-----------|---|----------------------|----------------------|-----------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|                     |               |           | 1. Jumlah dokumen bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor yang disediakan  | 2100                 | 2100                 | Dokumen   |              |                              |                                |
|                     |               |           | <b>Sub kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>  | 336,013,400          | 331,559,370          | Rp        |              |                              |                                |
|                     |               |           | Indikator Sub Kegiatan :  |                      |                      |           |              |                              |                                |
|                     |               |           | 1. Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara  | 10                   | 10                   | Unit      |              |                              |                                |
|                     |               |           | <b>Sub kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>   | 289,112,000          | 289,112,000          | Rp        |              |                              |                                |
|                     |               |           | Indikator Sub Kegiatan :  |                      |                      |           |              |                              |                                |
|                     |               |           | 1. Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor   | 12                   | 12                   | Laporan   |              |                              |                                |
|                     |               |           | <b>Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>  | <b>1,100,915,300</b> | <b>1,095,690,996</b> | <b>Rp</b> |              |                              |                                |
|                     |               |           | Indikator Kegiatan :  |                      |                      |           |              |                              |                                |
|                     |               |           | 1. Persentase Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dikelola  | 100                  | 70                   | %         |              |                              |                                |
|                     |               |           | <b>Sub kegiatan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas</b>                    | 647,847,300          | 642,622,996          | Rp        |              |                              |                                |
|                     |               |           | Indikator Sub Kegiatan :  |                      |                      |           |              |                              |                                |
|                     |               |           | 1. Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas                              | 28                   | 31                   | Unit      |              |                              |                                |
|                     |               |           | <b>Sub kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>  | 452,957,100          | 452,957,100          | Rp        |              |                              |                                |
|                     |               |           | Indikator Sub Kegiatan :  |                      |                      |           |              |                              |                                |
|                     |               |           | 1. Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota  | 12                   | 12                   | Laporan   |              |                              |                                |
|                     |               |           | <b>Sub kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota</b>   | 110,900              | 110,900              | Rp        |              |                              |                                |
|                     |               |           | Indikator Sub Kegiatan :  |                      |                      |           |              |                              |                                |
|                     |               |           | 1. Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota  | 1                    | 0                    | Laporan   |              |                              |                                |
|                     |               |           | <b>Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>  | <b>12,567,800</b>    | <b>12,567,800</b>    | <b>Rp</b> |              |                              |                                |
|                     |               |           | Indikator Kegiatan :  |                      |                      |           |              |                              |                                |
|                     |               |           | 1. Persentase Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota  | 100                  | 100                  | %         |              |                              |                                |
|                     |               |           | <b>Sub kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin</b>  | 12,567,800           | 12,567,800           | Rp        |              |                              |                                |
|                     |               |           | Indikator Sub Kegiatan :  |                      |                      |           |              |                              |                                |
|                     |               |           | 1. Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi   | 12                   | 12                   | Laporan   |              |                              |                                |
|                     |               |           | <b>Kegiatan Audit Dan Inspeksi Keselamatan LLAJ Di Jalan</b>  | <b>38,020,000</b>    | <b>38,000,000</b>    | <b>Rp</b> |              |                              |                                |
|                     |               |           | Indikator Kegiatan :  |                      |                      |           |              |                              |                                |
|                     |               |           | 1. Persentase Unit Pelaksana Keselamatan LLAJ di Jalan yang diaudit dan diinspeksi  | 100                  | 100                  | %         |              |                              |                                |
|                     |               |           | <b>Sub kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota</b> | 38,020,000           | 38,000,000           | Rp        |              |                              |                                |

| URUSAN PEMERINTAHAN      | OPD PELAKSANA            | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN   | TARGET                | REALISASI             | SATUAN    | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|--------------------------|--------------------------|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|                          |                          |           | Indikator Sub Kegiatan :<br>1. Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota               | 1                     | 1                     | Laporan   |              |                              |                                |
|                          |                          |           | <b>Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan/Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>465,350,000</b>    | <b>465,350,000</b>    | <b>Rp</b> |              |                              |                                |
|                          |                          |           | Indikator Kegiatan :<br>1. Persentase Ketersediaan Angkutan Umum yang beroperasi  | 100                   | 93                    | %         |              |                              |                                |
|                          |                          |           | <b>Sub kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>  | 66,600,000            | 66,600,000            | Rp        |              |                              |                                |
|                          |                          |           | Indikator Sub Kegiatan :<br>1. Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia                             | 650                   | 566                   | unit      |              |                              |                                |
|                          |                          |           | <b>Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota</b>                           | 398,750,000           | 398,750,000           | Rp        |              |                              |                                |
|                          |                          |           | Indikator Sub Kegiatan :<br>1. Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 12                    | 12                    | Laporan   |              |                              |                                |
|                          |                          |           | <b>Kegiatan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>   | <b>5,270,000</b>      | <b>5,270,000</b>      | <b>Rp</b> |              |                              |                                |
|                          |                          |           | Indikator Kegiatan :<br>1. Persentase Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang direalisasikan  | 100                   | 0                     | %         |              |                              |                                |
|                          |                          |           | <b>Sub kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>  | 5,270,000             | 5,270,000             | Rp        |              |                              |                                |
|                          |                          |           | Indikator Sub Kegiatan :<br>1. Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota   | 1                     | 0                     | dokumen   |              |                              |                                |
| <b>BIDANG NON URUSAN</b> |                          |           |   |                       |                       |           |              |                              |                                |
|                          | <b>DINAS PERHUBUNGAN</b> |           | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>  | <b>26,475,723,566</b> | <b>26,291,622,632</b> | <b>Rp</b> |              |                              |                                |
|                          |                          |           | Indikator Program :<br>1. Hasil Evaluasi AKIP   | 71,85                 | 67,56                 | Predikat  |              |                              |                                |
|                          |                          |           | 2. Kualitas Pelaporan Keuangan  | 750,00                | 754,56                | Nilai     |              |                              |                                |
|                          |                          |           | 3. Indeks Kepuasan Masyarakat   | 85,40                 | 80,59                 | Nilai     |              |                              |                                |
|                          |                          |           | 4. Level Maturitas SPIP   | 3,00                  | 0,00                  | Nilai     |              |                              |                                |
|                          |                          |           | <b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>  | <b>6,930,000</b>      | <b>6,930,000</b>      | <b>Rp</b> |              |                              |                                |
|                          |                          |           | Indikator Kegiatan :<br>1. Persentase keselarasan RKA perangkat daerah  | 100                   | 100                   | %         |              |                              |                                |
|                          |                          |           | <b>Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>   | 1,780,000             | 1,780,000             | Rp        |              |                              |                                |
|                          |                          |           | Indikator Sub Kegiatan :<br>1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 6                     | 3                     | dokumen   |              |                              |                                |

| URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN   | TARGET               | REALISASI            | SATUAN      | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|---------------------|---------------|-----------|---|----------------------|----------------------|-------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|                     |               |           | <b>Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</b>  | 2,120,000            | 2,120,000            | Rp          |              |                              |                                |
|                     |               |           | Indikator Sub Kegiatan :  |                      |                      |             |              |                              |                                |
|                     |               |           | 1. Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1                    | 0                    | dokumen     |              |                              |                                |
|                     |               |           | <b>Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</b>  | 1,250,000            | 1,250,000            | Rp          |              |                              |                                |
|                     |               |           | Indikator Sub Kegiatan :  |                      |                      |             |              |                              |                                |
|                     |               |           | 1. Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 2                    | 1                    | dokumen     |              |                              |                                |
|                     |               |           | <b>Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>   | 1,780,000            | 1,780,000            | Rp          |              |                              |                                |
|                     |               |           | Indikator Sub Kegiatan :  |                      |                      |             |              |                              |                                |
|                     |               |           | 1. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3                    | 1                    | dokumen     |              |                              |                                |
|                     |               |           | <b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>  | <b>7,027,405,916</b> | <b>6,854,362,778</b> | <b>Rp</b>   |              |                              |                                |
|                     |               |           | Indikator Kegiatan :  |                      |                      |             |              |                              |                                |
|                     |               |           | 1. Porsentase penyusunan laporan keuangan dan barang sesuai SAP   | 100                  | 99                   | %           |              |                              |                                |
|                     |               |           | <b>Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>   | 7,020,405,916        | 6,847,362,778        | Rp          |              |                              |                                |
|                     |               |           | Indikator Sub Kegiatan :  |                      |                      |             |              |                              |                                |
|                     |               |           | 1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 989                  | 773                  | Orang/bulan |              |                              |                                |
|                     |               |           | <b>Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>   | 5,000,000            | 5,000,000            | Rp          |              |                              |                                |
|                     |               |           | Indikator Sub Kegiatan :  |                      |                      |             |              |                              |                                |
|                     |               |           | 1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | 1                    | 1                    | dokumen     |              |                              |                                |
|                     |               |           | <b>Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</b>   | 2,000,000            | 2,000,000            | Rp          |              |                              |                                |
|                     |               |           | Indikator Sub Kegiatan :  |                      |                      |             |              |                              |                                |
|                     |               |           | 1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                     | 18                   | 9                    | dokumen     |              |                              |                                |
|                     |               |           | <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>  | <b>522,042,400</b>   | <b>517,676,143</b>   | <b>Rp</b>   |              |                              |                                |
|                     |               |           | Indikator Kegiatan :  |                      |                      |             |              |                              |                                |
|                     |               |           | 1. Porsentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran  | 100                  | 99                   | %           |              |                              |                                |
|                     |               |           | <b>Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>  | 30,000,000           | 30,000,000           | Rp          |              |                              |                                |
|                     |               |           | Indikator Sub Kegiatan :  |                      |                      |             |              |                              |                                |
|                     |               |           | 1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 1                    | 0                    | Paket       |              |                              |                                |
|                     |               |           | <b>Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>  | 127,460,100          | 127,460,100          | Rp          |              |                              |                                |
|                     |               |           | Indikator Sub Kegiatan :  |                      |                      |             |              |                              |                                |
|                     |               |           | 1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 3                    | 2                    | Paket       |              |                              |                                |
|                     |               |           | <b>Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>  | 35,055,000           | 35,055,000           | Rp          |              |                              |                                |
|                     |               |           | Indikator Sub Kegiatan :  |                      |                      |             |              |                              |                                |
|                     |               |           | 1. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan   | 2                    | 1                    | Paket       |              |                              |                                |

| URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN  | TARGET                | REALISASI             | SATUAN    | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|---------------------|---------------|-----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|                     |               |           | <b>Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>  | 139,008,300           | 137,270,043           | Rp        |              |                              |                                |
|                     |               |           | Indikator Sub Kegiatan :   |                       |                       |           |              |                              |                                |
|                     |               |           | 1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   | 4                     | 3                     | Paket     |              |                              |                                |
|                     |               |           | <b>Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</b>   | 90,525,000            | 87,897,000            | Rp        |              |                              |                                |
|                     |               |           | Indikator Sub Kegiatan :   |                       |                       |           |              |                              |                                |
|                     |               |           | 1. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  | 212                   | 159                   | Dokumen   |              |                              |                                |
|                     |               |           | <b>Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>   | 99,994,000            | 99,994,000            | Rp        |              |                              |                                |
|                     |               |           | Indikator Sub Kegiatan :   |                       |                       |           |              |                              |                                |
|                     |               |           | 1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 12                    | 9                     | Laporan   |              |                              |                                |
|                     |               |           | <b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>   | <b>83,760,900</b>     | <b>83,005,700</b>     | <b>Rp</b> |              |                              |                                |
|                     |               |           | Indikator Kegiatan :   |                       |                       |           |              |                              |                                |
|                     |               |           | 1. Persentase sarana prasarana aparatur yang terpelihara   | 100                   | 99                    | %         |              |                              |                                |
|                     |               |           | <b>Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>   | 17,000,000            | 17,000,000            | Rp        |              |                              |                                |
|                     |               |           | Indikator Sub Kegiatan :   |                       |                       |           |              |                              |                                |
|                     |               |           | 1. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan  | 2                     | 2                     | Unit      |              |                              |                                |
|                     |               |           | <b>Sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>                                       | 66,760,900            | 66,005,700            | Rp        |              |                              |                                |
|                     |               |           | Indikator Sub Kegiatan :   |                       |                       |           |              |                              |                                |
|                     |               |           | 1. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                      | 17                    | 15                    | Unit      |              |                              |                                |
|                     |               |           | <b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>   | <b>18,300,916,350</b> | <b>18,295,900,011</b> | <b>Rp</b> |              |                              |                                |
|                     |               |           | Indikator Kegiatan :   |                       |                       |           |              |                              |                                |
|                     |               |           | 1. Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran   | 100                   | 99                    | %         |              |                              |                                |
|                     |               |           | <b>Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>  | 18,026,916,350        | 18,023,575,011        | Rp        |              |                              |                                |
|                     |               |           | Indikator Sub Kegiatan :   |                       |                       |           |              |                              |                                |
|                     |               |           | 1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  | 12                    | 9                     | Laporan   |              |                              |                                |
|                     |               |           | <b>Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>  | 274,000,000           | 272,325,000           | Rp        |              |                              |                                |
|                     |               |           | Indikator Sub Kegiatan :   |                       |                       |           |              |                              |                                |
|                     |               |           | 1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  | 12                    | 9                     | Laporan   |              |                              |                                |
|                     |               |           | <b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>  | <b>534,668,000</b>    | <b>533,748,000</b>    | <b>Rp</b> |              |                              |                                |
|                     |               |           | Indikator Kegiatan :   |                       |                       |           |              |                              |                                |
|                     |               |           | 1. Presentase sarana prasarana aparatur yang terpelihara   | 100                   | 100                   | %         |              |                              |                                |
|                     |               |           | <b>Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b> | 157,550,000           | 157,550,000           | Rp        |              |                              |                                |
|                     |               |           | Indikator Sub Kegiatan :   |                       |                       |           |              |                              |                                |

| URUSAN PEMERINTAHAN | OPD PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN   | TARGET                | REALISASI             | SATUAN | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|---------------------|---------------|-----------|---|-----------------------|-----------------------|--------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
|                     |               |           | 1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 30                    | 23                    | Unit   |              |                              |                                |
|                     |               |           | <b>Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>                          | 377,118,000           | 376,198,000           | Rp     |              |                              |                                |
|                     |               |           | Indikator Sub Kegiatan :  |                       |                       |        |              |                              |                                |
|                     |               |           | 1. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1                     | 0                     | Unit   |              |                              |                                |
|                     |               |           | <b>JUMLAH TOTAL</b>   | <b>58.307.301.416</b> | <b>33.053.268.843</b> |        |              |                              |                                |

# **LAMPIRAN V**

**DATA ALOKASI BELANJA SELAMA 5 TAHUN  
TAHUN 2022**

**PERKEMBANGAN ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN**

**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIAMIS**

**TAHUN 2018 S/D 2022**

| NO            | TAHUN | JENIS BELANJA   | JUMLAH ANGGARAN |                 | SISA ANGGARAN  | %      |
|---------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|--------|
|               |       |                 | PAGU            | REALISASI       |                |        |
| 1             | 2018  | BTL             | 8.838.509.946   | 8.756.592.202   | 81.917.744     | 99,07  |
|               |       | PEGAWAI         | 181.480.000     | 180.180.000     | 1.300.000      | 99,28  |
|               |       | BARANG DAN JASA | 20.460.500.650  | 20.291.133.398  | 169.367.252    | 99,17  |
|               |       | MODAL           | 9.183.572.350   | 9.075.105.250   | 108.467.100    | 98,82  |
| 2             | 2019  | BTL             | 8.355.998.000   | 8.186.943.656   | 169.054.344    | 97,98  |
|               |       | PEGAWAI         | 317.500.000     | 317.500.000     | -              | 100,00 |
|               |       | BARANG DAN JASA | 21.737.781.600  | 20.684.683.872  | 1.053.097.728  | 95,16  |
|               |       | MODAL           | 6.546.073.400   | 6.415.035.504   | 131.037.896    | 98,00  |
| 3             | 2020  | BTL             | 7.625.930.200   | 7.257.760.608   | 368.169.592    | 95,17  |
|               |       | PEGAWAI         | 535.400.000     | 527.900.000     | 7.500.000      | 98,60  |
|               |       | BARANG DAN JASA | 22.022.313.475  | 19.739.611.387  | 2.282.702.088  | 89,63  |
|               |       | MODAL           | 46.251.100.325  | 45.895.248.440  | 355.851.885    | 99,23  |
| 4             | 2021  | PEGAWAI         | 7.091.342.091   | 6.915.766.245   | 175.575.846    | 97,52  |
|               |       | BARANG DAN JASA | 25.852.257.200  | 25.464.415.232  | 387.841.968    | 98,50  |
|               |       | MODAL           | 7.680.458.600   | 7.500.234.301   | 180.224.299    | 97,65  |
| 5             | 2022  | PEGAWAI         | 7.045.205.916   | 6.872.162.778   | 173.043.138    | 97,54  |
|               |       | BARANG DAN JASA | 25.660.424.450  | 24.942.718.722  | 717.705.728    | 97,20  |
|               |       | MODAL           | 25.601.671.050  | 1.238.387.343   | 24.363.283.707 | 4,84   |
| <b>JUMLAH</b> |       |                 | 192.680.217.837 | 187.208.110.095 | 5.472.107.742  | 97,59  |

# **LAMPIRAN VI**

**DATA PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
SELAMA 5 TAHUN**

**JUMLAH PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2018 S/D 2022**

| NO            | TAHUN | JENIS RETRIBUSI |                      |                      |                      |                    |                    |                    |                    |                   | JUMLAH                |
|---------------|-------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
|               |       | MENARA          | PARKIR               | PKB                  | TERMINAL             | KHUSUS<br>PARKIR   | BONGKAR<br>MUAT    | IZIN TRAYEK        | MCK                | JASA TOKO         |                       |
| 1             | 2018  | -               | 411.905.500          | 1.197.908.200        | 469.870.900          | 49.863.000         | 50.040.000         | 26.858.600         | 21.180.000         | 20.980.000        | 2.248.606.200         |
| 2             | 2019  | -               | 427.055.000          | 1.740.278.100        | 468.209.800          | 51.272.000         | 52.665.000         | 25.703.200         | 25.865.000         | 21.670.000        | 2.812.718.100         |
| 3             | 2020  | -               | 563.347.000          | 1.644.932.300        | 250.693.500          | 24.121.000         | 54.300.000         | 24.163.200         | 9.625.000          | 10.220.000        | 2.581.402.000         |
| 4             | 2021  | -               | 612.624.000          | 1.571.280.000        | 241.909.300          | 21.682.000         | 53.350.000         | 17.022.400         | 14.650.000         | 13.950.000        | 2.546.467.700         |
| 5             | 2022  | -               | 740.459.000          | 1.483.031.700        | 265.805.300          | 18.346.000         | 59.075.000         | 25.394.000         | 30.450.000         | 15.000.000        | 2.637.561.000         |
| <b>JUMLAH</b> |       | -               | <b>2.755.390.500</b> | <b>7.637.430.300</b> | <b>1.430.683.500</b> | <b>165.284.000</b> | <b>269.430.000</b> | <b>119.141.400</b> | <b>101.770.000</b> | <b>81.820.000</b> | <b>10.189.194.000</b> |

# **LAMPIRAN VII**

**DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT  
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. Otto Iskandardinata, Lingk. Selatan, Telp. ( 0265 ) 7578862  
Kab. Ciamis – Jawa Barat  
Kode Pos 46217

**HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)**  
**PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CIAMIS**  
**TAHUN 2022**

Periode Survei = 19 September s.d.19 Oktober 2022

**80,59**

**BAIK**

**Jumlah Responden = 209 Orang**

**Jenis Kelamin**

Laki-Laki = 199 Orang  
Perempuan = 10 Orang  
Tidak Diketahui = 0 Orang

**Pendidikan**

SD = 15 Orang  
SMP = 67 Orang  
SMA/SMK = 104 Orang  
Diploma I/II/III = 4 Orang  
S-1/ D-IV = 17 Orang  
S-2/S-3 = 1 Orang  
Tidak Diketahui = 1 Orang

**Mutu Pelayanan :**

**A** (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00  
**B** (Baik) : 76,61 - 88,30  
**C** (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60  
**D** (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99

Ciamis, November 2022

**PIK. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN CIAMIS**



**Drs. ACHMAD YANI, MM**  
NIP. 19751118 199412 1 001

# **LAMPIRAN VIII**

**DATA KINERJA TAHUN 2022**

**DATA IZIN PEMBAHARUAN (KARTU PENGAWASAN) TRAYEK TAHUN 2022**

| <b>NO</b> | <b>BULAN</b>  | <b>KARTU<br/>PENGAWASAN</b> | <b>SK IZIN<br/>TRAYEK</b> | <b>JUMLAH</b> |
|-----------|---------------|-----------------------------|---------------------------|---------------|
| 1         | JANUARI       | 61                          | 20                        | 81            |
| 2         | FEBRUARI      | 35                          | 12                        | 47            |
| 3         | MARET         | 37                          | 13                        | 50            |
| 4         | APRIL         | 27                          | 9                         | 36            |
| 5         | MEI           | 23                          | 12                        | 35            |
| 6         | JUNI          | 28                          | 4                         | 32            |
| 7         | JULI          | 46                          | 15                        | 61            |
| 8         | AGUSTUS       | 41                          | 15                        | 56            |
| 9         | SEPTEMBER     | 33                          | 13                        | 46            |
| 10        | OKTOBER       | 32                          | 9                         | 41            |
| 11        | NOVEMBER      | 18                          | 8                         | 26            |
| 12        | DESEMBER      | 44                          | 11                        | 55            |
|           | <b>JUMLAH</b> | <b>425</b>                  | <b>141</b>                | <b>566</b>    |









